

LAPORAN AKHIR
KAJIAN-KAJIAN LAINNYA YANG MENDUKUNG BIDANG
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Judul Penelitian :

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Danau
Toba



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
2017

**PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
DI KAWASAN DANAU TOBA**

**Laporan Akhir
KAJIAN-KAJIAN LAINNYA YANG MENDUKUNG BIDANG
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

**Disusun oleh:
Tim Pelaksana Kelitbangan Kegiatan Kajian-Kajian Lainnya
Yang Mendukung Bidang Ekonomi Dan Pembangunan**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
2017**

Lembar Persetujuan,

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN

**KAJIAN-KAJIAN LAINNYA YANG MENDUKUNG BIDANG
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

Judul Penelitian :

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Danau Toba

Oleh :

**Tim Pelaksana Kelitbangan Kegiatan Kajian-Kajian Lainnya Yang
Mendukung Bidang Ekonomi Dan Pembangunan**

Disetujui dan disahkan Oleh:

**KABID EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
BALITBANG PROVSU**

**TIM PENGENDALI MUTU (TPM)
BALITBANG PROVSU
Ketua,**

**Drs. H. Darwin Lubis, MM
Pembina TK. I
NIP. 196009111986021001**

**H. Makrum Rambe, SE, MM
Pembina
NIP. 196503101990031004**

Mengetahui,

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Ir. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660209 199203 1 004**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan menyusun rekomendasi kebijakan dalam usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif yang dilengkapi dan diperkuat dengan data kuantitatif. Analisa kualitatif yang digunakan adalah deskriptif induktif, sedangkan analisis data kuantitatif yang digunakan adalah persentase dalam bentuk tabulasi frekuensi ataupun cross tabulation (tabulasi silang). Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Danau Toba, dengan mengambil sampel di 15 desa/dusun/huta yang mewakili 14 kawasan peruntukan pariwisata di Kawasan Danau Toba berdasarkan Perpres 81 tahun 2014. Berdasarkan pengukuran indikator-indikator utama dari 5 isu utama pengembangan pariwisata berkelanjutan, teridentifikasi 13 (tiga belas) permasalahan yang menjadi tantangan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba, antara lain : 1) Keterlibatan masyarakat yang terbatas di dalam perencanaan pengembangan pariwisata; 2) Meningkatnya harga barang dan jasa akibat aktifitas kepariwisataan; 3) Ancaman konflik lahan; 4) Kondisi kebersihan lingkungan yang tidak baik; 5) Ketidaksiapan masyarakat lokal sebagai tuan rumah di sebuah destinasi wisata; 6) Terbatasnya akses wisatawan untuk menikmati budaya lokal; 7) Terbatasnya akses wisatawan muslim terhadap makanan halal; 8) Sikap pesimistis masyarakat lokal dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang kepariwisataan; 9) Kalah bersaingnya produk usaha masyarakat lokal; 10) Pariwisata sebagai produk musiman; 11) Kecilnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah; 12) Kecilnya dampak ekonomi langsung kepariwisataan bagi masyarakat lokal; dan 13) Belum adanya sistem pengelolaan limbah (cair dan padat) yang baik. Kebijakan yang dibutuhkan didalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Danau Toba adalah: 1) Meningkatkan perekonomian dengan adanya kegiatan pariwisata di Kawasan Danau Toba, dengan arahan kebijakan : a) memahami pasar; b) menjaga kondisi perdagangan; dan c) memelihara dan mengembangkan atraksi-atraksi wisata; 2) Menjamin kesejahteraan daerah dan masyarakat lokal dengan adanya kegiatan kepariwisataan di kawasan Danau Toba, dengan arah kebijakan : a) menekan kebocoran ekonomi; b) mengutamakan produk lokal; dan c) mempengaruhi tingkat pengeluaran (belanja) pengunjung; 3) Memenuhi kepuasan pengunjung di Kawasan Danau Toba, dengan arah kebijakan : a) menyediakan akses yang luas bagi pengunjung; b) menjaga kenyamanan dan keselamatan pengunjung; dan c) monitoring tingkat kepuasan wisatawan; 4) memastikan keterlibatan masyarakat lokal di dalam pengelolaan kepariwisataan, dengan arah kebijakan: a) memastikan pemberdayaan masyarakat lokal; b) memperbaiki partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan; dan c) menjamin posisi masyarakat adat; dan 5) Menjamin lingkungan di kawasan wisata Danau Toba tetap lestari, dengan arah kebijakan : a) mengurangi penggunaan bahan kimia yang merusak lingkungan; b) mengurangi pembuangan limbah ke lingkungan; c) menekan jumlah limbah dan menyediakan “disposal area” yang baik; dan d) mengawasi pembangunan fasilitas wisata yang baru.

Kata kunci : pengembangan, pariwisata berkelanjutan, danau toba, kebijakan

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir kegiatan Kajian-Kajian Lainnya Yang Mendukung Bidang Ekonomi Dan Pembangunan ini adalah sebuah hasil penelitian berjudul Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Danau Toba. Judul penelitian ini terpilih berdasarkan kesimpulan dari beberapa diskusi partisipatif, yang melibatkan stakeholder terkait dengan isu pengembangan kepariwisataan di Kawasan Danau Toba. Dengan harapan tersusunnya rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan para stakeholder, terutama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten di sekitar Danau Toba. Untuk mengembangkan kepariwisataan yang berkelanjutan di Kawasan tersebut.

Dijadikannya kawasan Danau Toba sebagai salah satu KSPN yang diprioritaskan untuk dikembangkan pada tahun 2016 yang lalu oleh Pemerintah Pusat, telah menjadi momentum bagi kawasan ini untuk berbenah didalam pengembangan kepariwisataan yang layak secara ekonomi dan memberikan tunjangan mata pencaharian bagi masyarakat lokal sekaligus melindungi budaya dan lingkungan asli di kawasan Danau Toba.

Didalam pelaksanaan penelitian ini, tim banyak berinteraksi dengan berbagai pihak yang berperan sebagai informan maupun pemberi bimbingan dan arahan, yang membantu didalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kelitbangan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Untuk itu, tim mengucapkan terima kasih atas semua informasi, kritik dan saran membangun yang diterima didalam penelitian ini.

Kami menyadari bahwa cakupan serta kualitas data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kami masih mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak yang berkepentingan dengan laporan ini, serta mengharapkan kerjasama yang sangat baik dengan berbagai pihak selama ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Medan, Nopember 2017
Tim Pelaksana Kelitbangan

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Akhir kegiatan Kajian-Kajian Lainnya Yang Mendukung Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan judul penelitian Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Danau Toba ini.

Kegiatan ini merupakan salah satu aksi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dalam menindaklanjuti usaha pengembangan kepariwisataan di kawasan danau Toba, yang telah menjadi isu hangat di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara akhir-akhir ini. Tuntutan dari berbagai pihak yang menginginkan usaha pengembangan tersebut dapat berdampak positif terhadap perekonomian, pelestarian budaya dan lingkungan di Kawasan Danau Toba, menggiring kegiatan ini terhadap sebuah kebutuhan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di sekitar Danau Toba, untuk menghadirkan sebuah konsep pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tentunya banyak pihak yang mengharapkan keluaran kegiatan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang berarti, didalam penyusunan kebijakan-kebijakan kepariwisataan di Kawasan Danau Toba. Namun kami sadar bahwa hasil penelitian ini masih membutuhkan penyempurnaan. Untuk itu, kami masih mengharapkan adanya usaha-usaha penyempurnaan yang dilakukan oleh pihak lain, untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang masih ada dari hasil penelitian ini.

Medan, 2017
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660209 199203 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR PUSTAKA	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Sasaran	7
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan.....	7
1.6 Luaran (Output) Yang Diharapkan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Pariwisata	9
2.2. Dampak Pariwisata.....	10
2.3. Pariwisata berkelanjutan.....	12
2.4. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	15
2.5. Isu dan Indikator utama Pariwisata berkelanjutan versi United nation World Tourism Organization (UNWTO).....	17
2.6. Penelitian terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Waktu Penelitian	25
3.2. Lokasi Penelitian.....	26
3.3. Sifat Penelitian.....	26

3.4. Data Dan Teknik Pengumpulan Data	27
3.5. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	28
3.6. Tahapan pelaksanaan Penelitian.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Deskripsi data berbasis angket/kuisisioner	37
4.1.1. Angket/kuisiner bagi masyarakat lokal.....	37
4.1.2. Angket/kuisiner bagi wisatawan (mancanegara).....	38
4.2. Kondisi Kepariwisata Di Kawasan Danau Toba.....	44
4.2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kegiatan Pariwisata di Kawasan Danau Toba	44
4.2.2. Dampak kegiatan pariwisata terhadap masyarakat lokal.....	46
4.2.3. Kepuasan Wisatawan Terhadap Pariwisata Di Kawasan Danau Toba	51
4.2.4. Manfaat Ekonomi Kepariwisata Bagi Masyarakat Lokal di Kawasan Danau Toba	56
4.2.5. Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat yang dihasilkan kegiatan Pariwisata di Kawasan Danau Toba	61
4.3. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba	64
4.4. Usulan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Danau Toba.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Rekomendasi.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan	25
Tabel 2. Penentuan Sampel Lokasi Penelitian	29
Tabel 3. Tahapan Pelaksanaan Penelitian	34
Tabel 4. Kelompok Usia dan pekerjaan masyarakat lokal yang menjadi informan penelitian	38
Tabel 5. Rekapitulasi jawaban terhadap kuisiner yang disebar kepada masyarakat lokal yang menjadi informan.....	39
Tabel 6. Kelompok Usia dan asal Negara wisatawan mancanegara di Kawasan danau Toba yang menjadi informan penelitian.....	40
Tabel 7. Kelompok asal Negara wisatawan mancanegara di Kawasan danau Toba yang menjadi informan penelitian.....	41
Tabel 8. Rekapitulasi jawaban para informan wisatawan mancanegara terhadap angket/kuisiner yang diajukan	42
Tabel 9. Daftar Masalah Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Danau Toba.....	69
Tabel 10. Pengelompokan masalah pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan danau toba berdasarkan bidang kebijakan.....	71
Tabel 11. Rumusan kebijakan terkait masalah pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan danau Toba.....	72
Tabel 12. Penanggung Jawab Atau Implementor Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Danau Toba	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik kelompok Usia dan pekerjaan masyarakat lokal yang menjadi informan penelitian.....	38
Gambar 2. Grafik kelompok Usia wisatawan mancanegara yang menjadi informan penelitian.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri pariwisata adalah sektor yang berdampak dua sisi (Shiji.O, 2016). Dengan perencanaan dan manajemen yang baik, pariwisata dapat menjadi kekuatan positif, membawa manfaat dan keuntungan di setiap destinasi pariwisata. Namun sebaliknya, jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, pariwisata dapat menjadi sebuah mesin degradasi, pariwisata juga dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian, sosial-budaya dan lingkungan setempat (Yazdi, 2012); (UNWTO, 2004); (Choi, 2013) dan (Zaei & Zaei, 2013). Yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya biaya perbaikan lingkungan dan sosial budaya (Weaver, 2006). Dikembangkan tanpa mempedulikan keberlanjutan, pariwisata tidak hanya bisa merusak masyarakat dan lingkungan, juga bisa mengandung benih kehancurannya sendiri (UNEP-UNWTO, 2005). Dengan demikian, pariwisata membutuhkan perencanaan dan tata kelola yang baik dalam usaha mewujudkan keberlanjutan lingkungan, kebermanfaatan sosial budaya dan ke-bergiatan ekonomi (Shiji.O, 2016).

Secara keseluruhan, pariwisata sebenarnya adalah salah satu bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Yazdi, 2012). Pariwisata berkelanjutan bukan bentuk diskrit atau khusus pariwisata. Sebaliknya, segala bentuk pariwisata harus berusaha untuk menjadi lebih berkelanjutan (UNEP-UNWTO, 2005). Pariwisata berkelanjutan adalah tujuan yang ingin dicapai, bukan jenis produk pariwisata yang spesifik (Lu & Nepal, 2009). Oleh sebab itu, merujuk pada teori pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) seperti yang diutarakan oleh Baker (2006); Elliott (2006) dan Rogers et al. (2008) ketiga aspek yang telah diutarakan sebelumnya (ekonomi, lingkungan dan sosial budaya) tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan

hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*).

Membangun pariwisata berkelanjutan bukan hanya mengenai bagaimana mengendalikan dan mengelola dampak negatif dari industri tersebut. Akan tetapi menempatkan sektor ini dalam sebuah posisi yang istimewa untuk memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal, dan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan untuk konservasi lingkungan. Dalam sektor pariwisata, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak harus dilihat sebagai kekuatan yang berlawanan, namun harus saling berkaitan satu sama lain sebagai aspirasi yang dapat dan harus saling memperkuat (UNEP-UNWTO, 2005). Untuk itu UNWTO (2004) menyatakan bahwa pariwisata yang berkelanjutan harus : 1) memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata; 2) menghormati keaslian sosial budaya masyarakat lokal; dan 3) menjamin dampak ekonomi jangka panjang yang layak, dengan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi semua pemangku kepentingan, termasuk lapangan kerja yang stabil dan layanan sosial bagi masyarakat lokal, dan memberikan kontribusi untuk pengentasan kemiskinan.

Tantangan utama dalam pariwisata berkelanjutan adalah mengembangkan usaha yang layak secara ekonomi yang memberikan tunjangan mata pencaharian bagi masyarakat lokal sekaligus melindungi budaya dan lingkungan asli. (Simpson, 2007). Pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan partisipasi informasi dari semua pihak terkait, serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan partisipasi yang luas dan membangun konsensus. Mencapai pariwisata berkelanjutan merupakan proses yang berkesinambungan dan membutuhkan pemantauan dampak yang konstan, memperkenalkan langkah-langkah pencegahan dan /atau perbaikan yang diperlukan bila dibutuhkan.

Pariwisata berkelanjutan juga harus mempertahankan tingkat kepuasan wisata dan memastikan pengalaman yang bermakna kepada para wisatawan, meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu keberlanjutan dan mempromosikan praktik pariwisata ramah lingkungan di antara mereka (UNWTO, 2004).

Kawasan Danau Toba (KDT) adalah danau tektonik-vulkanik terbesar di dunia (Maulana & Suswati, 2014) dan merupakan salah satu daerah kunjungan wisata unggulan utama untuk Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya kawasan ini sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata nasional (KSPN) dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, dan menjadi salah satu dari sepuluh KSPN yang diprioritaskan Pemerintah pusat untuk dikembangkan mulai tahun 2016 (melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016). Rencana ini telah ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Terpilihnya KDT sebagai KSPN prioritas untuk dikembangkan oleh Pemerintah pusat, memang sangat beralasan mengingat tidak seimbangnya antara potensi sumberdaya kepariwisataan yang dimiliki kawasan ini, dibandingkan dengan kontribusinya terhadap pendapatan daerah maupun pusat, serta yang terutama terhadap masyarakat lokal dari sektor pariwisata. Berdasarkan data, Kemenpar (2016) mencatat bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke KDT selama tahun 2012 – 2013 adalah -30.94%, dengan kontribusi terhadap devisa Negara hanya US \$ 10,680 ribu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa selama tahun 2009-2014 kontribusi sektor wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 (tujuh) Kabupaten di sekitar KDT rata-rata hanya 0.68%. PDRB perkapita di 7 (tujuh) Kabupaten yang merefleksikan

kesejahteraan masyarakat lokal di KDT, sepanjang tahun 2011-2013 juga tercatat rata-rata hanya Rp. 8.534.492/tahun.

Merujuk pengertian KSPN dalam PP No. 50 tahun 2011 pasal 1 ayat (6), KDT adalah sebuah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Sehingga dalam proses pengembangannya harus berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan (pasal 1 ayat (8) huruf a). Berlandaskan pernyataan sebelumnya dan merujuk prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengembangan kepariwisataan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam proses pengembangannya, maka didalam usaha pengembangan KDT maka penting diterapkannya serangkaian kebijakan untuk pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, demi terwujudnya KDT sebagai daerah tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

UNEP-UNWTO (2005) menyatakan bahwa keberlanjutan adalah tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pariwisata. Namun, ada kebutuhan yang jelas bagi pemerintah untuk mengambil peran utama. Hal ini disebabkan : 1) Industri pariwisata sangat terfragmentasi; 2) Keberlanjutan berkaitan dengan bidang yang menjadi perhatian publik; dan 3) Pemerintah memiliki banyak alat yang dapat digunakan untuk membuat perbedaan-seperti kekuatan untuk membuat peraturan dan menawarkan insentif ekonomi, dan sumber daya dan lembaga untuk mempromosikan dan menyebarkan praktik yang baik. Untuk itu, Pemerintah harus menyediakan ruang dan mendorong sektor swasta, wisatawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menanggapi isu-isu keberlanjutan. Ini dapat dicapai dengan membuat dan menerapkan serangkaian kebijakan untuk pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Lebih lanjut UNWTO & EC (2013) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah, sebagai ujung tombak yang paling berperan di dalam pengembangan pariwisata

berkelanjutan, dan memiliki peran kunci dalam memberikan kepemimpinan, dan berbagai fungsi penting untuk keberhasilan pengembangan dan promosi pariwisata, serta pengelolaan dampaknya. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk : 1) Memastikan koordinasi yang efektif antara fungsi mereka dalam hal pengembangan, promosi dan pengelolaan pariwisata dan harus menyediakan struktur yang diperlukan untuk memastikan koordinasi tersebut; 2) membangun badan koordinasi lintas sektor yang terlibat didalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan, termasuk keberlanjutan tujuan, dan bukan semata-mata berfokus pada pemasaran; 3) Menyediakan sumberdaya manusia dan keuangan yang memadai; dan 4) membangun partisipasi dan konsultasi “*bottom up*” dengan masyarakat lokal.

Tahun 2016 adalah tahun dimulainya percepatan pembangunan nasional termasuk pengembangan sepuluh destinasi pariwisata nasional. Presiden Republik Indonesia melalui Surat Setkab No : B-652/Seskab/Maritim/11/2015, tanggal 6 November 2015, telah menetapkan 10 langkah percepatan termasuk diantaranya adalah “agar Menteri Pariwisata bersama Menteri terkait, para Gubernur pada 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas, Bupati/Walikota terkait, agar fokus pada perbaikan 10 (sepuluh) destinasi prioritas pariwisata dengan mendukung dan memperkuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan sehingga benar-benar terlihat perubahannya”. Pernyataan tersebut menjelaskan posisi Pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten disekitar Danau Toba didalam usaha percepatan pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba adalah “mendukung dan memperkuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan sehingga benar-benar terlihat perubahannya”. Bila dihubungkan dengan pasal 4 huruf c Perpres Nomor 49 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Dewan Pengarah Otorita danau Toba memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memiliki kebijakan umum sebagai salah satu arahan yang dapat memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai pengelolaan,

pengembangan dan pembangunan KDT tersebut, termasuk dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai prinsip pengembangan pariwisata di KDT.

Berdasarkan teori keberlanjutan di sektor kepariwisataan dan amanat yang diemban oleh Pemerintah Daerah didalam usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan di KDT yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat membantu Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di sekitar Danau Toba dan para stakeholder terkait mengenai bagaimana mengembangkan sebuah usaha kepariwisataan yang berkelanjutan di KDT. Merujuk pada UNEP-UNWTO (2005) dan dikuatkan oleh hasil penelitian Lu & Nepal (2009) yang menyatakan bahwa pendefinisian dan penggunaan indikator-indikator keberlanjutan merupakan komponen utama dalam proses perencanaan dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan, maka penelitian ini akan menggunakan isu dan indikator utama pengembangan pariwisata berkelanjutan di sebuah destinasi wisata (*Baseline Indicators Of Sustainable Tourism Development for Tourism Destination*) oleh (UNWTO, 2004). Informasi yang diterima melalui pengukuran indikator-indikator tersebut diharapkan dapat menggambarkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi didalam pengelolaan atau pengembangan kepariwisataan berkelanjutan di KDT, yang ditentukan berdasarkan diskusi-diskusi partisipatif dengan melibatkan stakeholder-stakholder terkait di kawasan tersebut. Dengan demikian dapat disusun rekomendasi-rekomendasi kebijakan terkait kebijakan antisipasi ancaman maupun perbaikan pengelolaan kepariwisataan yang berkelanjutan di KDT.

1.2. Rumusan Permasalahan

1. Apa permasalahan pengembangan pariwisata berkelanjutan berdasarkan kondisi objektif kepariwisataan yang diukur melalui isu dan indikator utama pariwisata berkelanjutan di kawasan Danau Toba?
2. Kebijakan apa yang dapat dilakukan dalam usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis permasalahan usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba berdasarkan kondisi objektif kepariwisataan yang diukur melalui isu dan indikator utama pariwisata berkelanjutan.
2. Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan dalam usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba.

1.4. Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi subjek dalam kegiatan penelitian ini adalah para pemangku kepentingan (stakeholders) kepariwisataan di kawasan Danau Toba, meliputi unsur Pemerintah, para pelaku usaha kepariwisataan, para wisatawan dan masyarakat setempat.

1.5. Ruang Lingkup Kegiatan

Kajian ini bersifat umum, artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data-data dasar yang dibutuhkan dalam upaya merumuskan kebijakan umum Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten di sekitar Danau Toba, sebagai arahan percepatan pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Danau Toba. Agar pembahasan dalam kajian tidak terlalu luas, maka dibutuhkan batasan dan ruang lingkup. Batasan dan ruang lingkup yang ada meliputi :

a. Lingkup Substansi

Dari 12 (dua belas) isu yang telah ditentukan UNWTO sebagai isu utama pengembangan pariwisata berkelanjutan, penelitian ini akan berfokus terhadap 5 (lima) isu utama. Yaitu : a) Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pariwisata; b) Dampak kegiatan pariwisata terhadap masyarakat lokal; c) Kepuasan wisatawan; d) Manfaat ekonomi dari pariwisata; dan e) Pengelolaan limbah cair dan limbah padat. Dengan begitu, maka indikator-indikator yang

diukur dan didekripsikan hanya yang terkait pada isu-isu utama yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Lingkup spasial

Merupakan batasan wilayah penelitian yang menjelaskan batasan geografis pelaksanaan penelitian. Didalam penelitian ini yang menjadi wilayah penelitian adalah wilayah-wilayah peruntukan pariwisata di Kawasan Danau Toba, yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya.

1.6. Luaran (*Output*) Yang Diharapkan

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah dokumen hasil kegiatan penelitian atau kajian berupa *Idea Concept paper* (ICP), Proposal Penelitian, draft Laporan Akhir, Laporan Akhir dan Ringkasan Eksekutif. Dokumen-dokumen tersebut merupakan hasil dari setiap tahapan kelitbangan yang dilakukan dalam melaksanakan sebuah kegiatan penelitian, yang berisikan informasi-informasi mengenai rumusan permasalahan yang diangkat menjadi tujuan dari kegiatan penelitian, metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian, temuan atau hasil pengumpulan data, hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan, serta saran atau rekomendasi yang dirumuskan untuk diajukan menjadi bahan dan informasi penyusunan kebijakan bagi para pengampu kewenangan yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pariwisata

Pariwisata (*tourism*) sering diartikan sebagai rangkaian perjalanan seseorang atau kelompok orang (wisatawan, turis) ke suatu tempat untuk berlibur, menikmati keindahan alam dan budaya (*sightseeing*), bisnis, mengunjungi kerabat dan tujuan lainnya (Ramly, 2007).

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, wisata kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala yang menjadi sasaran wisata.

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor penting dalam perkembangan ekonomi global (Shiji.O, 2016); (Ekanayake, 2012); dan (Choi, 2013). Yazdi (2012) menyatakan bahwa Pariwisata adalah salah satu industri terbesar dan tercepat di dunia. Sektor ini telah menjadi sumber pendapatan, pekerjaan dan kekayaan penting di banyak negara. Pariwisata internasional kini mengisi bagian yang lebih besar dari penerimaan devisa dan pendapatan ekspor daripada industri

lain di dunia. Khusus pada Negara berkembang, Bunghez (2016) menyatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu pilar yang fundamental dari proses pembangunan karena merupakan salah satu kegiatan yang dominan dalam perekonomian, sedangkan untuk yang lain, terutama dengan pulau-pulau dan beberapa negara kecil, pariwisata adalah satu-satunya sumber mata uang asing dan sumber pekerjaan.

2.2. Dampak Pariwisata

Pariwisata adalah sektor yang berdampak dua sisi (Shiji.O, 2016). Dengan perencanaan dan manajemen yang baik, pariwisata dapat menjadi kekuatan positif, membawa manfaat dan keuntungan di setiap destinasi pariwisata di seluruh dunia. Namun sebaliknya, jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, pariwisata dapat menjadi sebuah mesin degradasi, pariwisata juga dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian, sosial-budaya dan lingkungan setempat (Yazdi, 2012); (UNWTO, 2004); (Choi, 2013) dan (Zaei & Zaei, 2013).

Kreag (2001) mencatat bahwa dampak positif pariwisata terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat dan lingkungan di sekitar daerah destinasi wisata. Dengan adanya kegiatan pariwisata kualitas hidup masyarakat lokal akan meningkat, pertemuan antara wisatawan dan masyarakat lokal akan terfasilitasi, pertukaran budaya akan terpromosikan, pemahaman masyarakat yang berbeda akan meningkat, identitas budaya masyarakat lokal akan terjaga, dan meningkatnya permintaan akan pameran sejarah dan budaya. Selain itu, akan ada perlindungan lingkungan atau pencegahan penurunan ekologi lebih lanjut, pelestarian bangunan dan monumen bersejarah serta perbaikan penampilan daerah (visual dan estetika).

Namun, Kreag (2001) juga mencatat bahwa pariwisata dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, seperti meningkatnya harga barang, jasa, tanah dan perumahan yang berakibat meningkatnya biaya hidup. berpotensi terhadap peningkatan tenaga kerja impor, meningkatkan biaya pengadaan dan perawatan infrastruktur, dan terjadinya kompetisi pemanfaatan lahan dengan sektor ekonomi lainnya. Untuk sosial dan budaya, pariwisata dapat mengakibatkan peningkatan

praktek alkoholisme, perjudian, kejahatan, narkoba, prostitusi, perubahan gaya hidup yang tidak diinginkan, pemindahan penduduk untuk pengembangan pariwisata, perubahan negatif dalam nilai dan adat istiadat, kelompok baru yang memodifikasi struktur sosial, dan rusaknya hubungan masyarakat. Sedangkan untuk lingkungan, pariwisata dapat mengakibatkan terjadinya Polusi (udara, air, kebisingan, limbah padat, dan visual), hilangnya lanskap alam dan lahan pertanian untuk pengembangan pariwisata, hilangnya ruang terbuka, rusaknya flora dan fauna (termasuk koleksi tanaman, hewan, batu karang, atau artifak oleh atau untuk wisatawan), degradasi lansekap, situs bersejarah, dan monument, kekurangan air, dan terganggunya siklus dan perilaku pemuliaan satwa liar.

Fandeli dan Nurdin (2005) menyatakan bahwa, pariwisata selama ini telah terbukti menghasilkan beberapa keuntungan ekonomi. Namun bentuk pariwisata yang menghasilkan wisatawan massal telah menimbulkan berbagai masalah utamanya menyebabkan terjadinya dampak negatif terhadap sosial budaya dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian pariwisata massal ini tidak sesuai dengan sebutan *green industry*. *Green industry* sangat sesuai dengan pariwisata yang berbasis alam utamanya ekowisata.

Pembangunan pariwisata hendaknya dilaksanakan secara bertahap/gradual, disertai dengan pengukuran dampak ekonomi untuk menimbang sejauhmana pariwisata telah mampu meningkatkan PAD dan perbandingannya dengan anggaran yang telah dikeluarkan. Pengukuran ekonomis lain yang diperlukan adalah sejauhmana pengeluaran masyarakat terserap dalam perekomian lokal (*retention*) dan sejauhmana tingkat kebocoran ekonomi (*leakages*) yang diakibatkan oleh sektor pariwisata

Dampak atau isu yang berkembang seiring dengan perkembangan pariwisata antara lain : penguasaan ekonomi yang tidak seimbang, terbatasnya nilai tambah lokal (*local added value*), minimnya keterlibatan masyarakat lokal, dampak lingkungan pariwisata, terkikisnya kearifan sosial dan nilai budaya serta meningkatkan biaya hidup dan beban bagi penduduk lokal (Hadi, 2007).

Lebih lanjut Hadi (2007) menyatakan bahwa, pariwisata dewasa ini cenderung memberikan manfaat kepada perusahaan global (imperialisme baru)

dan bersifat wisata masal (*mass tourism*), yang berorientasi hanya sekedar menikmati keindahan alam (*sea, sand and sun*), tanpa mempertimbangkan pengembangan nilai tambah untuk masyarakat lokal (*local value added*), nilai sosial budaya dan dampak lingkungan.

Pengembangan pariwisata yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya menyebabkan meningkatnya biaya perbaikan lingkungan dan sosial budaya (Weaver, 2006). Dikembangkan tanpa mempedulikan keberlanjutan, pariwisata tidak hanya bisa merusak masyarakat dan lingkungan, juga bisa mengandung benih kehancurannya sendiri (UNEP-UNWTO, 2005). Dengan demikian, pariwisata membutuhkan perencanaan dan tata kelola yang baik dalam usaha mewujudkan keberlanjutan lingkungan, kebermanfaatan sosial budaya dan kebergiatan ekonomi (Shiji.O, 2016).

2.3. Pariwisata berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan dapat dianggap sebagai penerapan gagasan pembangunan berkelanjutan ke sektor pariwisata. Pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan pariwisata yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau, pariwisata yang secara bijaksana menggunakan dan melestarikan sumber daya untuk mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang. Intinya, pariwisata berkelanjutan meminimisasi dampak negatif dan maksimalkan dampak positif kegiatan pariwisata tersebut (Weaver, 2006).

Pengembangan kawasan wisata berkelanjutan merupakan alternatif yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi maupun upaya pelestarian. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati secara terpadu. Pada tahap berikutnya dikembangkan model pengelolaan kawasan wisata yang berorientasi pelestarian lingkungan (Ramly, 2007).

Lebih lanjut Ramly (2007) menyatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi penting dan strategis di masa datang. Identifikasi dan perencanaan pengembangan industri pariwisata perlu dilakukan secara lebih

terperinci dan matang. Pengembangan industri pariwisata ini diharapkan juga mampu menunjang upaya pelestarian alam, kekayaan hayati dan kekayaan budaya. Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi daerah maupun upaya-upaya pelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, pariwisata sebenarnya adalah salah satu bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Yazdi, 2012). Pariwisata berkelanjutan bukan bentuk diskrit atau khusus pariwisata. Sebaliknya, segala bentuk pariwisata harus berusaha untuk menjadi lebih berkelanjutan (UNEP-UNWTO, 2005). Pariwisata berkelanjutan adalah tujuan yang ingin dicapai, bukan jenis produk pariwisata yang spesifik (Lu & Nepal, 2009). Oleh sebab itu, merujuk pada teori pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) seperti yang diutarakan oleh Baker (2006); Elliott (2006) dan Rogers et al. (2008) ketiga aspek yang telah diutarakan sebelumnya (ekonomi, lingkungan dan sosial budaya) tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*).

Membangun pariwisata berkelanjutan bukan hanya mengenai bagaimana mengendalikan dan mengelola dampak negatif dari industri tersebut. Akan tetapi menempatkan sektor ini dalam sebuah posisi yang istimewa untuk memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal, dan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan untuk konservasi lingkungan. Dalam sektor pariwisata, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak harus dilihat sebagai kekuatan yang berlawanan, namun harus saling berkaitan satu sama lain sebagai aspirasi yang dapat dan harus saling memperkuat (UNEP-UNWTO, 2005). Untuk itu UNWTO (2004) menyatakan bahwa pariwisata yang berkelanjutan harus : 1)

memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata; 2) menghormati keaslian sosial budaya masyarakat lokal; dan 3) menjamin dampak ekonomi jangka panjang yang layak, dengan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi semua pemangku kepentingan, termasuk lapangan kerja yang stabil dan layanan sosial bagi masyarakat lokal, dan memberikan kontribusi untuk pengentasan kemiskinan.

Tantangan utama dalam pariwisata berkelanjutan adalah mengembangkan usaha yang layak secara ekonomi yang memberikan tunjangan mata pencaharian bagi masyarakat lokal sekaligus melindungi budaya dan lingkungan asli. (Simpson, 2007). Pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan partisipasi informasi dari semua pihak terkait, serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan partisipasi yang luas dan membangun konsensus. Mencapai pariwisata berkelanjutan merupakan proses yang berkesinambungan dan membutuhkan pemantauan dampak yang konstan, memperkenalkan langkah-langkah pencegahan dan /atau perbaikan yang diperlukan bila dibutuhkan. Pariwisata berkelanjutan juga harus mempertahankan tingkat kepuasan wisata dan memastikan pengalaman yang bermakna kepada para wisatawan, meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu keberlanjutan dan mempromosikan praktik pariwisata ramah lingkungan di antara mereka (UNWTO, 2004).

UNEP-UNWTO (2005) menyatakan bahwa keberlanjutan adalah tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pariwisata. Namun, ada kebutuhan yang jelas bagi pemerintah untuk mengambil peran utama. Hal ini disebabkan : 1) Industri pariwisata sangat terfragmentasi; 2) Keberlanjutan berkaitan dengan bidang yang menjadi perhatian publik; dan 3) Pemerintah memiliki banyak alat yang dapat digunakan untuk membuat perbedaan-seperti kekuatan untuk membuat peraturan dan menawarkan insentif ekonomi, dan sumber daya dan lembaga untuk mempromosikan dan menyebarkan praktik yang baik. Untuk itu, Pemerintah harus menyediakan ruang dan mendorong sektor swasta, wisatawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menanggapi isu-isu keberlanjutan. Ini dapat dicapai dengan membuat dan menerapkan serangkaian kebijakan untuk pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Untuk

memastikan keberlanjutan jangka panjang sektor pariwisata, ada kebutuhan kebijakan dan rencana yang efektif di semua level, terutama di level setempat, di mana kegiatan pariwisata berlangsung. Dimana wisatawan berinteraksi dengan penyedia layanan dan masyarakat, dan dimana dampak positif dan negatif pariwisata paling terasa (UNWTO & MMTE, 2007)

2.4. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat pada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada yang lebih kompleks. Pengembangan meliputi kegiatan mengaktifkan sumberdaya, memperluas kesempatan mengakui keberhasilan dan mengintegrasikan kemajuan (Ramly, 2007).

Lebih lanjut Ramly (2007) menyatakan bahwa, dari segi kualitatif, pengembangan berfungsi sebagai upaya peningkatan yang meliputi penyempurnaan program kearah yang lebih baik. Dimana hal-hal yang dikembangkan meliputi aktivitas manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

Pengembangan produk-produk pariwisata dan aktivitas wisata pada suatu kawasan dapat dirinci terdiri dari (1) atraksi-atraksi yang dikembangkan dipilih yang memiliki nilai jual tinggi baik atraksi alam, heritage, budaya dan obyek buatan, (2) infrastruktur (fasilitas, utilitas) dibangun sesuai dengan budaya dan tradisi lokal serta terpadu dengan lingkungannya, (3) kelembagaan lokal diperkuat dan diberikan peranan yang lebih besar, (4) sumberdaya Manusia merupakan penentu keberhasilan pariwisata sesuai dengan sasarannya, (5) aspek ekonomi yang dikembangkan adalah ekonomi kerakyatan. Penghasilan kawasan dimaksud untuk dapat mempertahankan atau mengkonservasi kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, (6) Lingkungan kawasan pariwisata perlu dikaji kelayakannya, terutama dampak positif dan dampak negatif yang akan muncul.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan instrumen untuk mengkaji dampak lingkungan dan bagaimana menanganinya (Fandeli dan Nurdin, 2005).

. Didalam penyusunan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan, telah banyak metode yang digunakan. Lu & Nepal (2009) dalam makalahnya yang berjudul *Sustainable tourism research: an analysis of papers published in the Journal of Sustainable Tourism*, telah menganalisis dan mengidentifikasi makalah-makalah hasil penelitian yang dimuat dalam *Journal of Sustainable Tourism*, yang merupakan satu-satunya jurnal internasional yang secara eksklusif menyajikan penelitian-penelitian mengenai pariwisata berkelanjutan. Didalam makalah ini dinyatakan bahwa sebagian besar makalah (139 atau 41%) telah menerapkan metode kualitatif, diikuti dengan metode kuantitatif (125 atau 37%) dan campuran (21 atau 6%), sementara 16% adalah makalah teoritis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam analisis pariwisata berkelanjutan tetap tidak berubah, dengan metode survei sosial dan studi kasus sebagai dua metode yang paling umum diterapkan. Didalam artikel ini juga ditekankan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan secara efisien jika ada indikator keberlanjutan yang bermanfaat, andal dan dapat dipahami.

Sejalan dengan hasil penelitian (Lu & Nepal, 2009), UNEP-UNWTO (2005) menyatakan bahwa pendefinisian dan penggunaan indikator-indikator keberlanjutan merupakan komponen utama dalam proses perencanaan dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Dengan diketahuinya indikator-indikator tersebut dimungkinkan terpantaunya perubahan dari waktu ke waktu secara konstan dan konsisten. Indikator dapat digunakan untuk menunjukkan: 1) keadaan industri saat ini; 2) tekanan pada sistem; 3) dampak pariwisata; 4) upaya pengelolaan; dan 5) dampak tindakan manajemen. Indikator memberi peringatan dini kapan sebuah perubahan kebijakan atau tindakan baru mungkin diperlukan, dan juga memberikan dasar untuk perencanaan dan peninjauan jangka panjang terhadap pariwisata.

Selanjutnya dijelaskan bahwa sebuah indikator dapat diukur dengan berbagai alternatif dan metode yang saling melengkapi (penggunaan instrumen

yang berbeda-beda) dan dapat digambarkan dalam bentuk yang berbeda-beda pula, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif (UNWTO, 2004).

2.5. Isu dan Indikator utama Pariwisata berkelanjutan versi United nation World Tourism Organization (UNWTO)

Lebih dari satu dekade, UNWTO telah melakukan penelitian dan pengembangan mengenai indikator pariwisata berkelanjutan diberbagai daerah tujuan di dunia. Inti dari Program ini adalah pengelolaan risiko dan penyediaan informasi penting dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah hasil yang tidak dapat diterima dan tidak berkelanjutan. Informasi yang diterima melalui indikator-indikator tersebut memberi kemampuan untuk menentukan risiko terhadap aset utama, kepada masyarakat, terhadap nilai-nilai yang paling penting bagi masyarakat dan wisatawan, dan tingkat kesiapan destinasi jika terjadi masalah atau sebagai sarana untuk mengantisipasi dan mencegahnya. Pada tahun 2004, UNWTO telah menerbitkan buku Pedoman Indikator Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Pada Daerah Tujuan Wisata (*Indicators Of Sustainable Tourism Development for Tourism Destination guidebook*). Buku pedoman ini dirancang untuk membantu mengidentifikasi isu-isu kunci dan indikator yang dapat membantu pengelola merespons secara efektif dan mempertahankan apa yang membuat daerah tujuan wisata menjadi layak dan menarik.

Didalam pelaksanaannya, terdapat 12 (duabelas) tahapan prosedur untuk mendefinisikan dan menerapkan indikator-indikator tersebut. Prosedur ini adalah pendekatan bertahap, yang menghasilkan indikator-indikator operasional pada daerah tujuan wisata, idealnya terintegrasi dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang sedang berjalan untuk memperkuat ke-efektif-annya. Ke-12 tahapan tersebut adalah : **A. Penelitian dan Organisasi**; Langkah 1. Definisi / deliniasi kawasan wisata; Langkah 2. Penggunaan proses partisipatif; Langkah 3. Identifikasi aset dan risiko pariwisata; Langkah 4. Visi jangka panjang pada kawasan wisata; **B. Pengembangan Indikator**; Langkah 5. Pemilihan isu prioritas; Langkah 6. Identifikasi indikator yang diinginkan; Langkah 7.

Inventarisasi sumber data; Langkah 8. Seleksi Prosedur; **C. Pelaksanaan;** Langkah 9. Evaluasi kelayakan / pelaksanaan; Langkah 10. Pengumpulan dan analisis data; Langkah 11. Akuntabilitas, komunikasi dan pelaporan; Langkah 12. Monitoring dan evaluasi indikator aplikasi.

Didalam buku panduan tersebut telah ditentukan isu-isu yang paling umum terjadi (*Baseline Issues*) dari lebih dari 50 isu pariwisata berkelanjutan yang ada di beberapa negara di dunia. Pada setiap isu-isu tersebut juga telah ditentukan indikator-indikator dasar (*Baseline Indicator*) yang dianggap paling relevan dan layak diukur. Buku Panduan tersebut juga berisi prosedur untuk pengembangan indikator yang sesuai dengan masalah spesifik yang ditemukan di daerah tujuan wisata manapun. Untuk alasan ini, pengelola pariwisata perlu mengidentifikasi masalah prioritas di daerah tujuan wisata mereka, dengan berkonsultasi dengan kelompok pemangku kepentingan utama, dan mengembangkan indikator yang paling relevan untuk isu-isu prioritas tersebut. Adapun isu-isu yang menjadi *Baseline issues* pengembangan pariwisata berkelanjutan tersebut adalah:

1. Kepuasan masyarakat lokal terhadap kegiatan pariwisata; Indikator dasar yang diukur pada isu ini adalah: tingkat kepuasan masyarakat local terhadap kegiatan wisata.
2. Dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal; Indikator dasar yang diukur pada isu ini adalah: 1) rasio kedatangan wisatawan ke lokasi wisata lokal (rata-rata dan periode puncak / hari); 2) persentase yang percaya bahwa pariwisata telah membantu membawa layanan baru atau infrastruktur. (kuesioner); dan 3) jumlah dan kapasitas layanan sosial yang tersedia bagi masyarakat (persentase yang disebabkan oleh pariwisata)
3. Kepuasan wisatawan; Indikator dasar yang diukur pada isu ini adalah 1) Tingkat kepuasan oleh pengunjung; 2) Persepsi nilai uang (kemahalan / standar harga); dan 3) Persentase pengunjung yang kembali
4. Musim wisata; Indikator dasar yang diukur pada isu ini adalah 1) Kunjungan wisatawan pada bulan atau kuartal (distribusi sepanjang tahun); 2) Tingkat hunian untuk akomodasi berlisensi (resmi) per bulan (periode puncak relatif

terhadap musim rendah) dan% dari semua hunian pada kuartal atau bulan puncak; 3) % tempat usaha buka sepanjang tahun; dan 4) Jumlah dan% pekerjaan industri pariwisata yang bersifat permanen atau setahun penuh (dibandingkan dengan pekerjaan sementara)

5. Manfaat ekonomi dari pariwisata; Indikator dasar yang diukur pada isu ini adalah 1) Jumlah penduduk lokal (dan rasio laki-laki terhadap perempuan) yang dipekerjakan di bidang pariwisata (juga rasio lapangan kerja pariwisata terhadap jumlah pekerjaan); 2) Pendapatan yang dihasilkan oleh pariwisata sebagai% dari total pendapatan yang dihasilkan di masyarakat.
6. Manajemen energi; Indikator dasar yang diukur pada isu ini adalah 1) Konsumsi energi per kapita dari semua sumber (secara keseluruhan, dan oleh sektor pariwisata, per orang); 2) Persentase usaha yang berpartisipasi dalam program konservasi energi atau menerapkan kebijakan dan teknik penghematan energy; 3) % konsumsi energi dari sumber daya terbarukan (di tempat tujuan, tempat usaha)
7. Ketersediaan dan pemanfaatan air; Indikator dasar yang diukur pada isu ini adalah ; 1) Penggunaan air: (total volume yang dikonsumsi dan liter per turis per hari); dan 2) Penghematan air (% reduced, recaptured or recycled)
8. Kualitas air minum; Indikator dasar yang diukur pada isu ini adalah : 1) Persentase perusahaan pariwisata dengan air yang diolah dengan standar minum internasional; dan 2) Frekuensi penyakit yang terbawa air: jumlah / persentase pengunjung yang melaporkan penyakit yang terbawa air selama mereka tinggal.
9. Pengelolaan air limbah; Indikator dasar yang diukur pada isu ini adalah : 1) Persentase limbah yang mendapat perlakuan (tingkat rimaris atas, sekunder, tersier); dan 2) Persentase tempat usaha pariwisata (atau akomodasi) yang memiliki system pengolahan
10. Pengelolaan limbah padat (persampahan); Indikator dasar yang diukur pada isu ini adalah : 1) Volume sampah yang dihasilkan (ton) (per bulan); 2) Volume limbah yang didaur ulang (m³) / Total volume limbah (m³)

(ditentukan oleh jenis yang berbeda); dan 3) sampah yang berserakan di tempat umum

11. Kontrol manajemen; Indikator dasar yang diukur pada isu ini adalah : 1) Adanya proses penggunaan lahan atau perencanaan pembangunan termasuk pariwisata; 2) area yang dapat dikontrol (kerapatan, desain, dll.)
12. Kontrol intensitas penggunaan. Indikator dasar yang diukur pada isu ini adalah : 1) Jumlah kedatangan wisatawan (rata-rata, bulanan, periode puncak); dan 2) Jumlah wisatawan per meter persegi situs (misalnya di pantai, tempat wisata), per kilometer persegi tujuan, rata-rata jumlah / periode puncak rata-rata.

2.6. Penelitian terdahulu

- 1 Dimoska, T. & Petrevska, B. (2012). Indicators for Sustainable Tourism Development in Macedonia, Conference Proceedings, First International Conference on Business, Economics and Finance "From Liberalization to Globalization: Challenges in the Changing World", 13-15 September, 2012, Stip, Macedonia, pp. 389-400

Tujuan : Menentukan indikator pengembangan pariwisata berkelanjutan di Makedonia

Metode : Berdasarkan prosedur penentuan indikator dasar pariwisata berkelanjutan UNWTO. Sumber data adalah State Statistical Office of Macedonia, Ministry of Economy (Department for Tourism and Hospitality), Ministry of Environment and Physical Planning (Department for Sustainable Development, Office for Environment and Macedonian Information Centre for Environment - MEIC) and Hotel Association of Macedonia (HOTAM).

Hasil : Terlepas dari keterbatasan data yang tersedia, penelitian ini berkesimpulan bahwa pariwisata berkelanjutan di Macedonia

masih pada konsep yang sederhana atau tahap awal. Keberlanjutan yang ada secara umum masih pada aspek ekologi dan sosial budaya, tidak pada tingkat keberlanjutan ekonomi yang memadai. Karena masih sangat sederhana, penelitian ini merekomendasikan perlunya melakukan tindakan untuk memperbaiki keberlanjutan secara menyeluruh.

UNWTO & MMTE (Monte Negro Ministry of Tourism and Environment),
2007. Sustainable Tourism Indicators and Destination Management

- Tujuan : Menyusun kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata di Bjelasica dan Komovi Monte Negro
- Metode : prosedur penentuan indikator dasar pariwisata berkelanjutan UNWTO
- Hasil : Isu-isu prioritas yang penting untuk diselesaikan dalam usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bjelasica dan Komovi Monte Negro adalah :
1. Penyebaran bangunan membutuhkan perencanaan tata guna lahan dan pengendalian pembangunan yang efektif.
 2. Kurangnya tenaga kerja terampil dan berkualitas untuk kegiatan pariwisata.
 3. Kebutuhan untuk memperbaiki pengelolaan limbah.
 4. Kebutuhan akan diversifikasi produk yang lebih besar sepanjang tahun.
 5. Keinginan desentralisasi yang lebih besar dalam perencanaan.
 6. Kebutuhan melestarikan benda cagar budaya dan bangunan tradisional.
 7. Kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari penggunaan produk lokal di bidang

pariwisata.

8. Kenaikan harga tanah dan rumah, menyiratkan bahwa pariwisata telah mempengaruhi masyarakat local
9. Kebutuhan akan transportasi dan infrastruktur yang lebih baik
10. Kebutuhan akan informasi dan interpretasi pengunjung yang lebih baik.
11. Potensi untuk menggunakan energi yang lebih terbarukan
12. Manfaat pemberian fasilitas kredit yang lebih baik bagi investor local

UNWTO dan DTP (Department of Tourism of the Philippines), 2007.
Sustainable Tourism Indicators and Destination Management

Tujuan : Menentukan indikator dasar penyusunan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bohol Piliphina

Metode : prosedur penentuan indikator dasar pariwisata berkelanjutan UNWTO + Analisis strategi SWOT

Hasil : Berdasarkan hasil penelitian dan hasil diskusi, indikator berikut direkomendasikan untuk dipertimbangkan dalam membangun program pemantauan pariwisata yang berkelanjutan untuk Bohol. Indikator-indikator yang diyakini tim ahli paling tepat untuk diimplementasikan sesegera mungkin. Indikator-indikator tersebut adalah :

- % Wisatawan yang percaya bahwa Bohol adalah nilai terbaik untuk uang
- % Wisatawan yang akan merekomendasikan Bohol ke teman mereka
- Volume pengunjung (dan per meter persegi) rata-rata dan situs utama hari puncak

- % Wisatawan yang setuju bahwa Bohol adalah destinasi wisata yang bersih
- Pantai dimana struktur sesuai dengan peraturan zona penyelamatan
- Lama menginap (rata-rata)
- Tingkat hunian menurut klasifikasi pendirian
- % Penduduk lokal yang percaya bahwa pariwisata menawarkan kesempatan kerja yang baik bagi mereka
- % Wisatawan yang percaya bahwa mereka mendapat pelayanan yang baik di Bohol
- % Staf garis depan yang telah menerima pelatihan pariwisata (% staf dengan pelatihan yang sesuai dalam dua tahun terakhir)
- % Pengusaha lokal yang puas dengan tingkat akses terhadap modal dan layanan pendukung
- Jumlah insiden yang berhubungan dengan wisatawan per tahun, per bulan di musim yang tinggi (per jenis, jalan, kapal, aktivitas, kejahatan kecil)
- % Wisatawan yang percaya destinasi wisata Bohol aman
- % Penduduk dengan pendapat bahwa keamanannya baik
- Tidak, atau% LGU dengan proses konsultasi formal yang dilakukan
- % Bisnis puas dengan proses, merasa terlibat
- % Penduduk lokal yang percaya bahwa Bohol mendapat manfaat dari pariwisata
- % Penduduk lokal yang setuju bahwa pariwisata telah membantu mempertahankan budaya Bohol
- Tidak,% bangunan dalam keadaan memburuk,% dipulihkan
- % Penduduk setempat puas dengan perencanaan dan

pengelolaan destinasi wisata (Lokal Q)

- % Wisatawan yang setuju bahwa destinasi wisata direncanakan dengan baik dan dikelola (Exit Q)
- Jumlah pengunjung (total, rata-rata dan hari puncak)
- % Wisatawan yang percaya situs ini dikelola dengan baik dan terlindungi
- Daerah terumbu karang dalam kondisi baik
- Jumlah toilet per orang (rata-rata dan puncak)
- Pertemuan antara pengunjung dan tarsius dalam kondisi baik untuk tarsius dan turis
- % Wisatawan yang senang dengan pengalaman menonton ikan paus / lumba-lumba mereka% pengunjung karang yang percaya bahwa terumbu karang dikelola dengan baik dan terlindungi
- % Dari perusahaan pariwisata yang berada pada sistem air utama di bidang utama
- % Wisatawan yang setuju bahwa pulau tersebut memiliki air minum yang bersih dan aman
- % Pemandu yang telah menerima pelatihan yang sesuai
- % Wisatawan yang percaya bahwa situsnya bersih
- % Hari situs tersebut memenuhi standar coliform (kualitas air mandi)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai Maret s.d Agustus 2017, dengan jadwal pelaksanaan seperti pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV	Bulan V	Bulan VI
1	Pembentukan Tim kelitbangan	■					
2	Penentuan topik/tema penelitian	■					
	Survei pendahuluan	■					
	Rapat penentuan judul penelitian		■				
3	Penyusunan ICP dan Proposal penelitian		■				
4	Rapat proposal penelitian		■				
5	Sidang TPM I		■				
6	Persiapan pengumpulan data		■				
7	Pengumpulan Data		■	■	■	■	■
8	Pengolahan, Analisis dan Interpretasi data			■	■	■	■
9	Penyusunan draft laporan akhir				■	■	■
10	Rapat hasil penelitian						■
11	Sidang TPM II						■
12	Penyempurnaan Laporan Akhir						■
13	Cetak dan Penggandaan laporan						■

3.2. Lokasi Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan pada sasaran penelitian dan lingkup spasial penelitian. Lokasi penelitian adalah kawasan pariwisata di Kawasan Danau Toba yang diwakili oleh zona-zona peruntukan pariwisata yang telah diatur dalam Perpres 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya. Meliputi, zona B3.1 (kawasan pariwisata berkelas (*high-end*)) dan zona B3.2 (kawasan pariwisata massal yang menyediakan atraksi wisata, fasilitas wisata, serta fasilitas umum yang memadai dan digunakan secara bersama).

Zona B3.1 terdiri atas 1) Kawasan Wisata Berkelas (*High-End*) Simalem di Kecamatan Merek Kabupaten Karo yang merupakan kawasan ekowisata, wisata kuliner serta wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE); dan 2) Kawasan Wisata Berkelas (High-End) Balige - Tara Bunga – Tampahan yang meliputi Perkampungan Parmalim di Kecamatan Laguboti, Perkampungan Meat di Kecamatan Tampahan, Wisata Budaya Balige, dan Tara Bunga di Kecamatan Balige pada Kabupaten Toba Samosir yang merupakan kawasan ekowisata, wisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta wisata tirta. Sedangkan zona B3.2 terdiri atas 1) Kawasan Wisata Parapat - Tiga Ras; 2) Kawasan Wisata Taman Eden; 3) Kawasan Wisata Muara-Baktiraja; 4) Kawasan Wisata Pangururan – Sianjur Mula-mula; 5) Kawasan Wisata Tuk-tuk – Tomok; 6) Kawasan Wisata Onan Runggu – Taman Bumi Lagundi; 7) Kawasan Wisata Taman Bumi Nainggolan; 8) Kawasan Wisata Lumban Julu; 9) Kawasan Wisata Taman Wisata Iman Dairi; 10) Kawasan Wisata Ronggur Nihuta – Palipi; 11) Kawasan Wisata Harian – Sitio-tio; dan 12) Kawasan Wisata Salib Kasih.

3.3. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu model penelitian yang berusaha untuk membuat gambaran/paparan dan menggali secara cermat serta mendalam tentang fenomena sosial tertentu tanpa melakukan intervensi dan hipotesis. Pendekatan penelitian utama yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sehingga data yang utama adalah bersifat kualitatif. Akan tetapi untuk melengkapi analisis data kualitatif, maka akan ditampilkan dan diperkuat pula dengan data-data yang bersifat kuantitatif, dengan pemahaman bahwa penelitian

ini menggunakan paradigma kualitatif yang dilengkapi dan diperkuat dengan data kuantitatif. Analisa kualitatif yang digunakan adalah deskriptif induktif, sedangkan data kuantitatif yang digunakan adalah persentase dalam bentuk tabulasi. Jadi sesuai dengan tujuan penelitian, maka untuk data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi induktif. Sedangkan untuk data kuantitatif (data-data yang dapat dikategorikan dalam bentuk angka-angka) analisis yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif berupa persentase yang ditampilkan dalam bentuk tabulasi frekuensi ataupun *cross tabulation* (tabulasi silang).

3.4. Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Data didalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data angket dan/ atau wawancara, observasi dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Teknik pengumpulan data angket dan/atau wawancara akan dilakukan terhadap para subjek penelitian yaitu Pihak Pemerintah, para pelaku usaha kepariwisataan, para wisatawan dan masyarakat lokal di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur, berdasarkan prosedur pengukuran indikator dasar Pariwisata berkelanjutan versi UNWTO.

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati kondisi dan situasi pengelolaan kepariwisataan di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan didalam teknik observasi ini disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Sedangkan teknik FGD dilakukan dengan mengumpulkan seluruh stakeholder kepariwisataan di kawasan danau toba didalam sebuah grup diskusi, untuk memberikan tanggapan atau pendapat terhadap data yang telah dikumpulkan didalam analisis kondisi kepariwisataan di kawasan danau toba. FGD ini diselenggarakan didalam pemilihan permasalahan utama kepariwisataan di kawasan danau toba, dalam usaha pengembangan kepariwisataan berkelanjutan.

Data sekunder didalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi terhadap dokumen atau arsip yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data ini adalah Badan Pusat Statistik, Bappeda dan Dinas pariwisata Provinsi dan 7 Kabupaten sekitar Danau Toba.

3.5. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Zona-zona wilayah peruntukan pariwisata di Kawasan danau Toba adalah wilayah yang menjadi populasi daerah penelitian. Didalam Perpres 81 Tahun 2014, telah diatur bahwa zona peruntukan pariwisata di kawasan Danau Toba terbagi atas 2 (dua) zona, yaitu Zona B3.1 (2 kawasan wisata) dan zona B3.2 (12 kawasan wisata), yang tersebar di setiap penjuru Danau Toba dan terdapat di 7 (tujuh) Kabupaten sekitar Danau Toba. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan (tabel 2), terhitung bahwa ke-14 kawasan wisata tersebut terdiri atas 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 51 (lima puluh satu) Desa atau Huta (dusun).

Dengan pertimbangan terhadap keterbatasan sumberdaya yang dimiliki kegiatan penelitian, maka pengumpulan data tidak akan dilaksanakan di seluruh zona peruntukan pariwisata tersebut. Sebagai perwakilan setiap kawasan, dipilih 1 (satu) desa atau Huta. Maka dari 14 (empat belas) kawasan wisata diwakili oleh 15 (lima belas) Desa atau Huta. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pertimbangan yang digunakan adalah bahwa desa-desa tersebut dapat mewakili setiap kawasan wisata dan juga ke-7 Kabupaten sekitar Danau Toba. Pemilihan desa sebagai perwakilan setiap wilayah di jelaskan pada tabel 3.

Untuk menentukan informan atau responden penelitian dari unsur masyarakat lokal, wisatawan dan pelaku usaha pariwisata, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling* (*non-probability sampling*). Metode tersebut dipilih dengan mempertimbangkan faktor ukuran populasi atau sampel yang tidak diketahui. Didalam prakteknya, peneliti mengambil sampel dari orang-orang yang kebetulan ada di lokasi penelitian, dan bersedia dijadikan sebagai informan. Sedangkan penentuan informan dari unsur pemerintah, metode *sampling* yang digunakan adalah *search sampling*, dimana didalam prakteknya peneliti akan mencari individu yang dari lembaga-lembaga Pemerintah terkait, yang memahami topik yang sedang dibahas.

3.6. Tahapan pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian dijelaskan pada tabel 3.

Tabel. 2. Penentuan Sampel Lokasi Penelitian

No	Kawasan peruntukan pariwisata	Kecamatan/ Kabupaten	Objek wisata	Jenis wisata	Desa/ Huta	Sampel
1	Kawasan Wisata Berkelas (<i>High-End</i>) Simalem	Kec. Merek (Karo)	Desa Simalem	kawasan ekowisata, wisata kuliner serta wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE)	1. Desa Kodon-kodon 2. Desa Tongging	Desa Tongging dan Kodon-kodon
2	Kawasaan Wisata Berkelas (<i>High-End</i>) Balige - Tara Bunga – Tampahan	Kec. Balige (Tobasa)	Wisata Budaya Balige (Museum TB Silalahi, Sekolah Pendidikan Soposurung, dan Makam Sisingamangaraja) , dan Tara Bunga	kawasan ekowisata, wisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta wisata tirta	1. Desa Silalahi Pagar Batu, 2. Huta Soposurung, 3. Huta Tarabunga	Desa Meat;
		Kec. Laguboti (Tobasa)	Perkampungan Parmalim		Huta Tinggi	
		Kecamatan Tampahan (Tobasa)	Perkampungan Meat		Desa Meat	
3	Kawasan Wisata Parapat - Tiga Ras;	Kec. Dolok Pardamean (Simalungun)	Pantai Garoga	kawasan ekowisata, wisata tirta, dan wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran	Desa Tiga Ras	Desa parapat
		Kec. Pematang Sidamanik (Simalungun)				

		Kec. Girsang Sipangan Bolon (Simalungun)	Penangkaran monyet Sibaganding dan Parapat		1. Desa Sibaganding 2. Desa parapat	
		Kec. Ajibata (Tobasa)	Pantai Long Beach		Desa Parsaoran	
4	Kawasan Wisata Taman Eden;	Kecamatan Lumban Julu (Tobasa)	Taman Eden 2; dan Taman Eden 100	kawasan ekowisata	Desa Lumban Rang Sionggang Utara	Desa Lumban Rang Sionggang Utara
5	Kawasan Wisata Muara-Baktiraja;	Kec. Baktiraja (Humbahas)	Istana dan peninggalan Sisingamangaraja I – VII, Aek Sipangolu, dan Tombak Sulu-sulu	kawasan ekowisata, wisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta wisata tirt	1. Desa Bakkara 2. Desa Simangulampe 3. Desa Marbun	1. Desa Bakkara 2. Desa Sibandang
		Kecamatan Peranginan (Humbahas)	Wisata Alam Sipinsur		Desa Pearung	
		Kecamatan Lintong Nihuta (Humbahas)	Wisata Alam Dolok Pesona		Desa Dolok Marduga	
		Kec. Muara (Taput)	Pulau Sibandang dan Pantai Muara		1. Desa Sibandang 2. Desa Huta Nagodang	
6	Kawasan Wisata Pangururan – Sianjur Mula-mula;	Kec. Pangururan (Samosir)	Pantai Parbaba, Pantai Lumban Manik, Taman Bumi Aek Rangat	kawasan ekowisata, wisata tirta serta wisata cagar budaya dan ilmu	1. Desa Huta Bolon 2. Huta Lumban Manik	Desa Sianjur Mulamula

				pengetahuan	3. Huta Aek Rangat	
		Kecamatan Simanindo (Samosir)	Pantai Cinta Damai, Pulo Tao, Kawasan Lomba Paralayang Siulak Hosa, Gua Lontung, Sipokki, Gua Alam Sangkal, Kawasan Bukit Beta Kite Internasional, dan Batu Marhosa, Wisata Budaya Samosir (pertunjukan Sigalegale, pemakaman Raja Sidabutar, Tenun Ulos Simanindo, dan Museum Simanindo)		1. Desa Cinta Damai 2. Desa Simanindo Sangkal 3. Huta Siulak Hosa 4. Desa Tanjungan 5. Desa Tuktuk 6. Desa Parmonangan 7. Desa Tomok	
		Kecamatan Sianjur Mula-mula (Samosir)	Taman Wisata Sigulati, Taman Bumi di Perkampungan Si Raja Batak, Taman Bumi Gunung Pusuk Buhit yang mencakup Simpang Batu Hobon dan Dolok Pusuk Buhit, serta Taman Bumi Holly Mountain		1. Desa Sipitundai 2. Desa Sianjur Mulamura 3. Desa huta gurgur	
7	Kawasan Wisata Tuk-tuk – Tomok;.	Kecamatan Simanindo (Samosir)	Tuk-tuk, Tomok, Taman Bumi Tuktuk Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur)	kawasan ekowisata, kawasan wisata tirta serta wisata cagar budaya dan ilmu	1. Desa Tuk tuk Siadong 2. Desa Tomok	Desa Tuk Tuk Siadong

				pengetahuan		
8	Kawasan Wisata Onan Runggu – Taman Bumi Lagundi;	Kecamatan Onan Runggu (Samosir)	Pantai Lagundi, Pantai Pasir Putih Sukkean, Hariara Nabolon/Pohon Besar Sukkean, Pananganan, Tambun Surlau, Kawasan Mual Siraja Sonang dan Taman Bumi Lagundi	kawasan wisata tirta dan ekowisata	1. Desa Sitamiang 2. Huta Sukkean 3. Desa pakpahan	Desa Sitamiang
9	Kawasan Wisata Taman Bumi Nainggolan;	Kecamatan Nainggolan (Samosir)	Batu Guru	kawasan ekowisata	Desa Pangaloan	Desa Pangaloan
10	Kawasan Wisata Lumban Julu;	Kecamatan Lumban Julu (Tobasa)	Pantai Lumban Julu (Situmurung Waterfall)	kawasan wisata tirta	Desa Pasar Lumban Julu	Desa Pasar Lumban Julu
11	Kawasan Wisata Taman Wisata Iman Dairi;	Kecamatan Sitinjo (Dairi)	Taman Wisata Iman Dairi	kawasan wisata religi	Desa Sitinjo	Desa Sitinjo
12	Kawasan Wisata Ronggur Nihuta – Palipi;	Kecamatan Ronggur Nihuta (Samosir)	Kawasan Aek Liang, Kawasan Jea ni Tano, Kawasan Aek Sipale Onggang, dan Kawasan Pea Porogan	kawasan ekowisata dan wisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan	1. Huta Aek Liang 2. Desa Lintongnihuta 3. Desa Salaon Toba	Desa Salaon Toba
		Kecamatan Palipi (Samosir)	Kawasan Batu Rantai dan Kawasan Hariara Maranak		1. Desa palipi 2. Desa Urat II	
13	Kawasan Wisata	Kecamatan Harian	Janji Martahan, Mata Air	Kawasan Ekowisata	1. Desa janji	Desa janji

	Harian – Sitio-tio; dan	(Samosir)	dan Pohon Pokki, Gua Parmonangan, Ulu Darat, dan Janji Matogu		Martahan 2. Desa Turpuk Sihotang 3. Desa Turpuk Malau 4. Desa Partukko Naginjang	Martahan
		Kecamatan Sitio- tio (Samosir)	Mata Air – Gua Datu Parngongo, Permandian Boru Saronding		1. Desa Sabulan	
14	Kawasan Wisata Salib Kasih	Kecamatan Siatas (Taput)	Taman Wisata Salib Kasih	kawasan wisata religi	Desa Simorangkir	Desa Simorangkir

Tabel 3. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator	Jenis Data	Teknik Pengumpulan data	Sumber data	Analisis Data
1	Menganalisis permasalahan usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba berdasarkan isu dan indicator utama pariwisata berkelanjutan yang telah di tentukan oleh UNWTO	Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pariwisata	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pariwisata (kuisisioner)	Primer	Pengisian angket / kuisisioner dan wawancara	Masyarakat Lokal	deskriptif
		Dampak kegiatan pariwisata terhadap masyarakat lokal	Rasio kedatangan wisatawan ke lokasi wisata lokal (rata-rata dan periode puncak / hari)	Sekunder	Dokumentasi	Pelaku usaha dan Pemerintah	deskriptif
			Persentase yang percaya bahwa pariwisata telah membantu membawa layanan baru atau infrastruktur. (kuesioner)	Primer	Pengisian angket / kuisisioner dan wawancara	Masyarakat Lokal,	deskriptif
			Jumlah dan kapasitas layanan sosial yang tersedia bagi masyarakat (% disebabkan oleh pariwisata)	Primer dan sekunder	Pengisian angket / kuisisioner, wawancara, Observasi dan dokumentasi	Masyarakat Lokal, pelaku usaha dan pemerintah	deskriptif
		Kepuasan	Tingkat kepuasan oleh	Primer	Pengisian	Wisatawan	deskriptif

		Wisatawan	pengunjung		angket / kuisisioner dan wawancara		
			Persepsi nilai uang (kemahalan / standar harga)	Primer	Pengisian angket / kuisisioner dan wawancara	Wisatawan	deskriptif
			Persentase pengunjung yang akan kembali berkunjung	Primer	Pengisian angket / kuisisioner dan wawancara	Wisatawan	deskriptif
		Manfaat Ekonomi Pariwisata	Jumlah penduduk lokal (dan rasio laki-laki terhadap perempuan) yang dipekerjakan di bidang pariwisata (juga rasio lapangan kerja pariwisata terhadap jumlah pekerjaan)	Sekunder	Dokumentasi	Pemerintah	Deskriptif
			Persentase pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata	Primer	Pengisian angket / kuisisioner dan wawancara	Masyarakat Lokal	deskriptif
		Pengolahan Limbah cair dan Limbah padat	Persentase limbah yang mendapat perlakuan / treatment	Sekunder	Dokumentasi	Pemerintah dan pelaku usaha	Deskriptif

			Persentase tempat usaha pariwisata (atau akomodasi) yang memiliki sistem pengolahan limbah	Sekunder	Dokumentasi	Pemerintah dan pelaku usaha	Deskriptif
			Volume sampah yang dihasilkan (ton) (per bulan)	Sekunder	Dokumentasi	Pemerintah dan pelaku usaha	Deskriptif
			Volume limbah yang didaur ulang (m ³) / Total volume limbah (m ³) (ditentukan oleh jenis yang berbeda)	Sekunder	Dokumentasi	Pemerintah dan pelaku usaha	Deskriptif
			sampah yang berserakan di tempat umum	Primer	observasi		Deskriptif
2	Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan dalam usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba			Primer (Tujuan 1)	FGD	Pemerintah dan pelaku usaha pariwisata	Analisis Kualitatif

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi data berbasis angket/kuisisioner

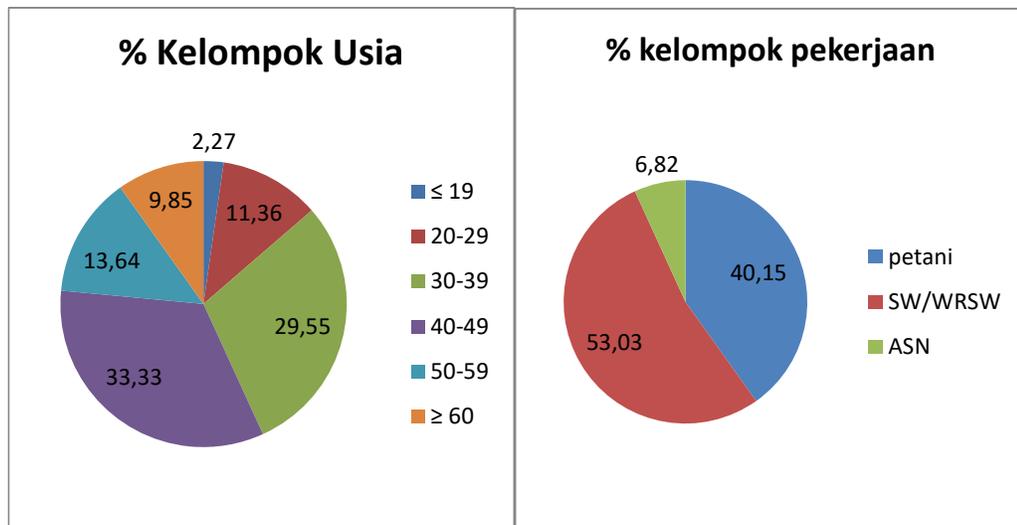
4.1.1. Angket/kuisisioner bagi masyarakat lokal

Instrument yang digunakan untuk mengetahui pendapat masyarakat lokal terhadap kegiatan pariwisata di Kawasan Danau Toba adalah wawancara, observasi dan survei berbasis angket/kuisisioner (lampiran 1) yang diterjemahkan langsung dari lampiran C.6 buku *Indicators Of Sustainable Development For Tourism Destinations* (halaman 494). Pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat lokal terdiri atas 3 kelompok pertanyaan. Yaitu 1) Bagaimana pendapat mereka terhadap pernyataan bahwa dampak pariwisata baik mereka (masyarakat lokal); 2) Bagaimana pendapat mereka terhadap pernyataan bahwa secara pribadi (informan) diuntungkan dengan adanya kegiatan pariwisata; dan 3) Bagaimana pendapat mereka terhadap dampak-dampak kegiatan pariwisata (sosial, ekonomi dan lingkungan) di daerah mereka.

Masyarakat lokal yang menjadi informan berjumlah 132 orang yang tersebar di 15 (lima belas) desa yang berada di 14 (empat belas) kawasan peruntukan wisata di Kawasan danau Toba. Berdasarkan kelompok usia, informan terbagi atas 6 kelompok, yaitu kelompok usia ≤ 19 tahun (2.27%); 20 tahun s/d 29 tahun (11.36%); 30 tahun s/d 39 tahun (29.55%); 40 tahun s/d 49 tahun (33.33%); 50 tahun s/d 59 tahun (13.64%); dan kelompok usia ≥ 60 (9.85). Berdasarkan profesi atau pekerjaan, informan terbagi atas 3 kelompok, yaitu petani (40,15%); swasta/wiraswasta (53.03%); dan ASN (Aparatur Sipil Negara) sebesar 6.82%. Untuk lebih jelasnya, kelompok usia dan profesi informan penelitian ini ditampilkan pada tabel 4 dan gambar 1. Rekapitulasi jawaban tersaji pada tabel 5.

Tabel. 4. Kelompok Usia dan pekerjaan masyarakat lokal yang menjadi informan penelitian.

No	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (orang)	%	Pekerjaan	Jumlah (orang)	%
1	≤ 19	3	2.27	Petani	53	40.15
2	20-29	15	11.36	SW/WRSW	70	53.03
3	30-39	39	29.55	ASN	9	6.82
4	40-49	44	33.33			
5	50-59	18	13.64			
6	≥ 60	13	9.85			



Gambar 1. Grafik kelompok Usia dan pekerjaan masyarakat lokal yang menjadi informan penelitian

4.1.2. Angket/kuisiner bagi wisatawan (mancanegara)

Sama halnya dengan angket/kuisiner bagi masyarakat lokal, daftar pertanyaan yang disusun di dalam penelitian ini juga merupakan kutipan langsung dari daftar pertanyaan yang telah disusun UNWTO terkait pendapat para wisatawan yang berkunjung di sebuah destinasi wisata (lampiran C 5, halaman 491, buku *Indicators Of Sustainable Development For Tourism Destinations*). Kelompok pertanyaan yang diajukan terbagi atas 4 kelompok pertanyaan, yaitu : 1) Alasan mengunjungi Kawasan danau Toba; 2) jumlah

kunjungan ke Kawasan Danau Toba; 3) Lokasi wisata apa yang dikunjungi; 4) Pendapat informan terhadap kondisi daerah wisata, penduduk lokal, budaya, lingkungan dan apakah informan akan merekomendasikan kawasan wisata ini kepada teman dan kerabatnya, 5) Catatan mereka terhadap kekurangan dan kelebihan kegiatan kepariwisataan di Kawasan Wisata Danau Toba, serta apa yang harus diperbaiki.

Tabel 5. Rekapitulasi jawaban terhadap kuisiner yang disebar kepada masyarakat lokal yang menjadi informan.

No	Masyarakat Lokal di Kawasan Danau Toba	1		2		3		4		5		Jumlah rata-rata
		(sangat tidak setuju)		(tidak setuju)		(netral)		(setuju)		(sangat setuju)		
1	Dampak pariwisata baik bagi kami	0	0.0%	2	1.5%	16	12.1%	78	59.1%	36	27.3%	4.12
2	Saya secara pribadi diuntungkan dengan adanya kegiatan pariwisata	1	0.8%	3	2.3%	26	19.7%	70	53.0%	32	24.2%	3.98
3	Kegiatan pariwisata di wilayah kami berdampak sebagai berikut:											
a	Menciptakan lapangan kerja	1	0.8%	5	3.8%	17	12.9%	81	61.4%	28	21.2%	3.98
b	Memperkerjakan pemuda setempat	6	4.5%	9	6.8%	20	15.2%	71	53.8%	26	19.7%	3.77
c	Meningkatkan harga barang	6	4.5%	20	15.2%	39	29.5%	49	37.1%	18	13.6%	3.40
d	Membantu masyarakat mendapat pelayanan sosial	8	6.1%	14	10.6%	36	27.3%	62	47.0%	12	9.1%	3.42
e	penyebab kenaikan tingkat kejahatan	25	18.9%	50	37.9%	35	26.5%	12	9.1%	10	7.6%	2.48
f	membahayakan standar moral setempat	36	27.3%	58	43.9%	26	19.7%	10	7.6%	2	1.5%	2.12
g	mengganggu aktivitas masyarakat lokal	30	22.7%	75	56.8%	22	16.7%	5	3.8%	0	0.0%	2.02
h	membahayakan lingkungan/alam	31	23.5%	71	53.8%	24	18.2%	5	3.8%	1	0.8%	2.05
i	menutup akses masyarakat menuju lokasi wisata	30	22.7%	71	53.8%	20	15.2%	8	6.1%	3	2.3%	2.11
j	Membantu merangsang pertumbuhan budaya dan kerajinan lokal	0	0.0%	1	0.8%	17	12.9%	80	60.6%	34	25.8%	4.11
k	Menggunakan sumberdaya lokal (contohnya hasil pertanian)	2	1.5%	3	2.3%	28	21.2%	74	56.1%	25	18.9%	3.89
l	masyarakat memiliki kontrol terhadap kegiatan pariwisata	3	2.3%	7	5.3%	36	27.3%	74	56.1%	12	9.1%	3.64
m	Uang yang dihabiskan oleh wisatawan sampai ke masyarakat lokal	3	2.3%	11	8.3%	29	22.0%	70	53.0%	19	14.4%	3.69
n	masyarakat lokal memiliki akses mudah ke daerah yang digunakan wisatawan	1	0.8%	7	5.3%	29	22.0%	70	53.0%	25	18.9%	3.84

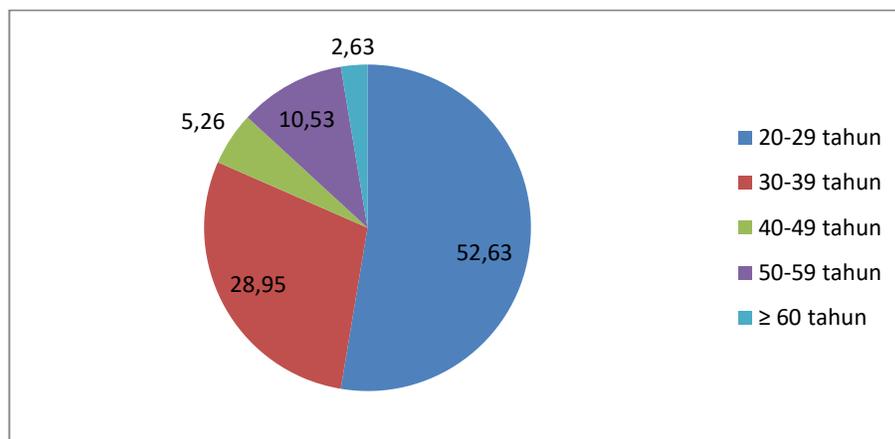
Wisatawan mancanegara yang menjadi informan sebagai perwakilan wisatawan yang berkunjung di Kawasan Danau Toba diwakilkan oleh 38 orang wisatawan yang berasal dari 15 negara, yaitu Prancis (6 orang), Australia (4 orang), Belanda (4 orang), Swiss (4 orang), Chili (2 orang), Austria (2 orang), Skotlandia (1 orang), Inggris (4 orang), Korea (1 orang), Jerman (5 orang), Uzbekistan (1 orang), Spanyol (1 orang), Kanada (1 orang), Denmark (1 orang) dan Irlandia (1 orang). Berdasarkan kelompok usia, informan terbagi atas 5 kelompok usia, yaitu kelompok usia 20-29 tahun (20 orang), 30-39 tahun (11 orang), 40-49 tahun (2 orang), 50-59 tahun (4 orang) dan ≥ 60 tahun sebanyak 1 orang. Penentuan individu yang dijadikan informan dilakukan dengan metode *accidental sampling*, yaitu dengan memilih orang yang kebetulan berada di lokasi wisata dan bersedia mengisi angket yang dibagikan oleh peneliti. Deskripsi mengenai komposisi informan dari wisatawan mancanegara dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6 dan 8, serta gambar 2. Rekapitulasi jawaban dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 6. Kelompok Usia dan asal Negara wisatawan mancanegara di Kawasan danau Toba yang menjadi informan penelitian

No	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (orang)	%
1	≤ 19	0	0.00
2	20-29	20	52.63
3	30-39	11	28.95
4	40-49	2	5.26
5	50-59	4	10.53
6	≥ 60	1	2.63
		38	100.00

Tabel 7. Kelompok asal Negara wisatawan mancanegara di Kawasan danau Toba yang menjadi informan penelitian

No	Asal Negara	Jumlah
1	Francis	6
2	Australia	4
3	Belanda	4
4	Swiss	4
5	Chili	2
6	Austria	2
7	Skotlandia	1
8	Inggris	4
9	Korea	1
10	Jerman	5
11	Uzbekistan	1
12	Spanyol	1
13	Kanada	1
14	Denmark	1
15	Irlandia	1
Jumlah		38



Gambar 2. Grafik kelompok Usia wisatawan mancanegara yang menjadi informan penelitian

Tabel 8. Rekapitulasi jawaban para informan wisatawan mancanegara terhadap angket/kuisisioner yang diajukan

No	Pertanyaan	jawaban										
		Alasan	jumlah	%								
1	Alasan mengunjungi Kawasan Danau Toba											
		Kondisi alam	:	21	55.3%							
		Budaya	:	7	18.4%							
		Dan lain-lain	:	10	26.3%							
2	Apakah ini kunjungan pertama anda	Ya	:	30	78.9%							
		Tidak	:	8	21.1%							
3	Selama berada di kawasan danau Toba anda berkunjung ke ?	Ya		Tidak								
		Mengunjungi pantai	21 (55.3%)	17 (44.7%)								
		Mengunjungi pegunungan	25 (65.8%)	13 (34.2%)								
		Berjalan di jalur alami	21 (55.3%)	17 (44.7%)								
		menghadiri konferensi	0 (0%)	38 (100%)								
		mengunjungi kerabat	2 (5.3%)	36 (94.7%)								
		mengunjungi situs budaya	31 (81.6%)	7 (18.4%)								
		melakukan bisnis	0 (0%)	38 (100%)								
		menghadiri pertunjukan budaya	26 (68.4%)	12 (31.6%)								
4	Tolong jawab pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang sesuai	1 sangat tidak setuju		2 Tidak setuju		3 Netral		4 Setuju		5 Sangat Setuju		
		- Saya menikmati pengalaman saya di sini	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	18	47.4%	19	50.0%
		- Keadaan jalan membuat perjalanan mudah	2	5.3%	3	7.9%	11	28.9%	18	47.4%	4	10.5%
		- kawasan wisata menyediakan beragam pengalaman yang baik	0	0.0%	0	0.0%	8	21.1%	18	47.4%	12	31.6%
		- Kota dan desa ramai (sesak)	8	21.1%	18	47.4%	7	18.4%	5	13.2%		0.0%

-	Saya memiliki pengalaman bagus yang melibatkan budaya lokal	0	0.0%	3	7.9%	10	26.3%	19	50.0%	6	15.8%
-	Situs budaya terpelihara dengan baik	1	2.6%	1	2.6%	7	18.4%	22	57.9%	7	18.4%
-	Situs budaya mudah diakses	0	0.0%	0	0.0%	7	18.4%	25	65.8%	6	15.8%
-	Pantai-pantai bersih	3	7.9%	4	10.5%	19	50.0%	10	26.3%	2	5.3%
-	Cinderamata dan kerajinan tangan yang bagus tersedia	2	5.3%	1	2.6%	11	28.9%	12	31.6%	12	31.6%
-	Saya memiliki kesempatan yang baik untuk menikmati masakan lokal	0	0.0%	1	2.6%	3	7.9%	11	28.9%	23	60.5%
-	Kualitas makanan yang baik	1	2.6%	0	0.0%	1	2.6%	17	44.7%	19	50.0%
-	Kualitas akomodasi yang baik	0	0.0%	1	2.6%	3	7.9%	17	44.7%	17	44.7%
-	Tingkat pelayanan yang diberikan tinggi	0	0.0%	2	5.3%	2	5.3%	15	39.5%	19	50.0%
-	Staf layanan berkompeten dan membantu	0	0.0%	2	5.3%	4	10.5%	10	26.3%	22	57.9%
-	Saya terganggu oleh kondisi daerah yang dibangun dengan tidak baik	10	26.3%	14	36.8%	6	15.8%	5	13.2%	3	7.9%
-	Saya terganggu oleh kebisingan	11	28.9%	18	47.4%	5	13.2%	3	7.9%	1	2.6%
-	Saya terganggu dengan sampah yang berserakan di tempat umum	7	18.4%	12	31.6%	8	21.1%	8	21.1%	3	7.9%
-	Keadaan lingkungan alami bagus	0	0.0%	5	13.2%	7	18.4%	17	44.7%	9	23.7%
-	Kawasan wisata memiliki pemandangan yang menarik dan bervariasi	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	14	36.8%	23	60.5%
-	Mudah untuk sampai ke kawasan wisata untuk kunjungan saya	2	5.3%	0	0.0%	12	31.6%	15	39.5%	9	23.7%
-	Saya merasa aman dan nyaman selama kunjungan saya	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	57.9%	16	42.1%
-	Saya merasa harga-harga sudah standard dan baik	0	0.0%	0	0.0%	3	7.9%	15	39.5%	20	52.6%
-	Saya akan merekomendasikan kawasan wisata ini kepada teman saya	0	0.0%	1	2.6%	2	5.3%	11	28.9%	24	63.2%
-	Saya akan mengunjungi kawasan wisata ini lagi	1	2.6%	2	5.3%	10	26.3%	7	18.4%	18	47.4%

4.2. Kondisi Kepariwisata Di Kawasan Danau Toba

4.2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kegiatan Pariwisata di Kawasan Danau Toba

Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, kepuasan masyarakat lokal terhadap kegiatan wisata sangat penting. Dalam kasus yang ekstrim, ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap kegiatan pariwisata akan mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat lokal atas kehadiran para wisatawan ke daerah mereka, yang berujung terhadap penolakan (UNWTO, 2004). Hal ini menjadi lumrah ketika berbicara mengenai pariwisata berkelanjutan, yang mana menuntut partisipasi masyarakat didalam usaha pengembangannya. tentu tidak akan didapat ketika masyarakat telah merasa tidak senang dengan adanya kegiatan-kegiatan pariwisata di daerah mereka. Wardani & Nasution (2016) meyakini bahwa keterlibatan atau partisipasi masyarakat lokal menjadi penting bila dikaitkan dengan upaya keberlanjutan pariwisata itu sendiri, dalam hal perlindungan terhadap lingkungan maupun manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting agar upaya pengembangan pariwisata tidak hanya demi meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga betul-betul memberikan manfaat terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar obyek pariwisata yang bersangkutan

Berdasarkan rekapitulasi jawaban masyarakat lokal terhadap dua pertanyaan terkait tingkat kepuasan mereka terhadap kegiatan pariwisata yang berlangsung di daerah mereka, terlihat bahwa mayoritas informan telah merasa puas. Hal ini ditandai dengan positifnya jawaban mereka terhadap pernyataan: 1) bahwa kegiatan pariwisata berdampak baik bagi masyarakat masyarakat lokal ; dan 2) bahwa masyarakat danau toba secara pribadi diuntungkan dengan adanya kegiatan pariwisata. Skor rata-rata jawaban atas pernyataan bahwa dampak pariwisata baik terhadap masyarakat lokal adalah 4.12 dari nilai maksimal 5, yang menempatkan komposisi jawaban berada di pernyataan setuju dan sangat setuju. Sedangkan untuk pernyataan bahwa informan secara pribadi diuntungkan dengan adanya kegiatan pariwisata, skor berada pada nilai 3.98 dari nilai maksimal 5, yang menempatkan komposisi jawaban mayoritas pada pernyataan setuju.

Berdasarkan rekapitulasi survei tersebut juga diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang menjadi informan menyatakan bahwa kegiatan pariwisata tidak mengganggu aktifitas mereka sehari-hari, dengan mayoritas menjawab tidak setuju terhadap pernyataan bahwa kegiatan pariwisata di daerah mereka telah mengganggu aktifitas mereka sehari-hari (skor 2.02/ mayoritas tidak setuju). Di pihak lain, hasil survei terhadap para wisatawan juga mendukung hasil survei sebelumnya. Berdasarkan rekapitulasi jawaban para wisatawan yang menjadi informan dalam penelitian ini, diketahui bahwa mayoritas (57.9%) para wisatawan menyatakan setuju (skor 4.47) terhadap pernyataan bahwa mereka merasa aman dan nyaman selama berada di lokasi wisata.

Hasil survei sebelumnya mendukung hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Zainal, Sagala, & Armayanti, 2016), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam meningkatkan daya saing pariwisata di Danau Toba. Dengan melakukan survei terhadap 212 masyarakat lokal di sekeliling danau Toba, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerimaan masyarakat lokal di kawasan danau toba terhadap pariwisata tergolong tinggi. Masyarakat lokal memandang pariwisata adalah aspek penting dan secara umum dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi mereka.

Jawaban atas survei yang dilakukan berbasis angket sebelumnya, juga sama dengan jawaban masyarakat lokal ketika peneliti menanyakan langsung pendapat mereka atas berlangsungnya kegiatan pariwisata di wilayah mereka. Masyarakat cenderung menggambarkan pariwisata sebagai suatu hal yang positif. Pariwisata adalah sumber pendapatan dan sebagai jalan bagi datangnya pembangunan ke wilayah mereka. Mereka mencotohkan bagaimana desa-desa mereka mendapatkan perhatian Pemerintah (pusat maupun daerah) melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, layanan sosial lainnya), yang disebabkan oleh rencana atau telah berlangsungnya kegiatan wisata tersebut. Walaupun sebagian dari mereka menyatakan bahwa tidak semua masyarakat lokal mendapat manfaat langsung dari pariwisata (dampak ekonomi berbentuk uang), namun dengan diperhatikannya daerah mereka oleh pemerintah, telah menjadi indikator positif dampak wisata tersebut kepada mereka.

Satu hal yang menjadi masalah mengenai kepuasan masyarakat lokal terhadap kegiatan kepariwisataan di wilayah ini adalah, ungkapan kekecewaan mengenai ketidak terlibatan mereka pada rencana-rencana pengembangan wisata yang sekarang sedang isu besar di wilayah ini. Menurut mereka partisipasi masyarakat saat itu hanya sebatas pada partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan seperti; memberi tempat tinggal, memberikan makanan dan minuman, menunjuk arah jalan, dan sebagainya. Tidak ada perencanaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Menurut mereka, selama ini setiap kebijakan hanya lahir dari pemerintah, sedangkan masyarakat hanya dilibatkan pada saat kebijakan itu sudah ada dalam berbagai diskusi dan sosialisasi. Kesimpulan ini dikuatkan dengan pernyataan Sitorus.et.al (2016) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi di kawasan danau toba masih pada kategori tokenisme, yaitu sekedar justifikasi dan partisipasi sering menjadi semu. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pariwisata Danau Toba masih rendah dan belum ada mekanisme yang adil untuk menjaring partisipasi masyarakat. Partisipasi yang ada masih dalam taraf mengikutkan pejabat publik dalam berbagai forum pengambilan keputusan. Walaupun ada perwakilan masyarakat, namun belum secara representatif mewakili masyarakat. Misalnya di Kabupaten Samosir ada forum tokoh masyarakat yang sering diikutsertakan, namun forum ini diketuai oleh mantan pejabat senior di daerah dan bukanlah perwakilan masyarakat adat.

4.2.2. Dampak kegiatan pariwisata terhadap masyarakat lokal

Dibeberapa daerah destinasi wisata di dunia, banyak masyarakat lokal beranggapan bahwa kegiatan pariwisata berdampak negatif terhadap sumberdaya alam dan budaya mereka, namun tidak memungkiri bahwa kegiatan pariwisata juga merupakan sumber pendapatan yang mereka butuhkan. Demikian sebaliknya ada juga yang beranggapan bahwa pariwisata telah membantu masyarakat lokal meningkatkan pengetahuannya mengenai budaya lain dan menjadi instrumen yang mendidik dalam melestarikan lingkungan, namun tidak berdampak menguntungkan secara ekonomi. Dampak sosial, budaya, ekonomi dan

lingkungani dari sebuah kegiatan pariwisata terhadap masyarakat lokal dan lingkungan di sekitarnya adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Mungkin secara bersama-sama dapat menguntungkan, atau secara individu ada yang menguntungkan dan ada yang berdampak merugikan. Namun yang pasti, dengan adanya kegiatan pariwisata hampir tidak mungkin bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya untuk memisahkan diri dari wisatawan dan budaya lain yang datang ke wilayah mereka.

Didalam pengembangan pariwisata, menerima pembangunan ekonomi sering berarti menerima perubahan budaya dan lingkungan. Hal ini dapat terjadi tanpa ada kesempatan bagi masyarakat untuk memutuskan apakah mereka benar-benar menginginkan perubahan. Oleh sebab itu, agar tidak menjadi masalah dikemudian hari, yang menyebabkan tingginya biaya perbaikan (sosial budaya, ekonomi dan lingkungan) sebagai akibat dari dampak berlangsungnya kegiatan pariwisata tersebut, penting di ketahui bagaimana kegiatan wisata tersebut telah berdampak.

Berdasarkan rekapitulasi hasil survei yang dilakukan terhadap masyarakat yang menjadi informan pada penelitian ini, diketahui bahwa mayoritas para informan berpendapat bahwa pariwisata masih berdampak baik terhadap ketiga aspek (sosial, budaya dan lingkungan) yang dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa para informan percaya bahwa kegiatan pariwisata telah : 1) menciptakan lapangan kerja (skor rata-rata 3.98 / kategori setuju); 2) mempekerjakan pemuda setempat (skor rata-rata 3.77 / kategori setuju); 3) membantu masyarakat mendapat pelayanan sosial (infrastruktur atau fasilitas sosial) (skor rata-rata 3.42 / kategori netral menuju setuju); 4) membantu merangsang pertumbuhan budaya dan kerajinan lokal (skor rata-rata 4.11 / kategori setuju); 5) menggunakan sumberdaya lokal (skor rata-rata 3.89 / kategori setuju); dan 6) Uang yang dihabiskan oleh wisatawan sampai ke masyarakat lokal (skor rata-rata 3.69 / kategori setuju). Dari data tersebut juga diketahui bahwa para informan tidak percaya bahwa kegiatan pariwisata telah berdampak terhadap : 1) kenaikan tingkat kejahatan (skor rata-rata 2.48 / kategori tidak setuju); 2) membahayakan standar moral setempat (skor rata-rata 2.12 / kategori tidak setuju);

3) mengganggu aktivitas masyarakat lokal (skor rata-rata 2.02 / kategori tidak setuju; dan 4) membahayakan lingkungan/alam (skor rata-rata 2.05 ; kategori tidak setuju).

Satu-satunya masalah atau dampak tidak baik kegiatan pariwisata di kawasan danau toba berdasarkan survei ini adalah bahwa mayoritas informan percaya bahwa kegiatan pariwisata telah mengakibatkan meningkatnya harga barang (skor rata-rata 3.42 / kategori netral menuju setuju). Kreag (2001) mencatat bahwa salah satu dampak negatif sebuah kegiatan pariwisata adalah meningkatnya harga barang, jasa, tanah dan perumahan yang berakibat meningkatnya biaya hidup, berpotensi terhadap peningkatan tenaga kerja impor, meningkatkan biaya pengadaan dan perawatan infrastruktur, dan terjadinya kompetisi pemanfaatan lahan dengan sektor ekonomi lainnya. Senada dengan pendapat tersebut, Choi (2013) berpendapat bahwa kenaikan harga merupakan salah satu dampak negatif pariwisata terhadap perekonomian. Choi menyatakan *“In fact, the economic impact of tourism tends to consist of a mix of positive and negative things for the local community. For example, tourism creates employment opportunities for the local people but at the same time it also increases the cost of living, including the price of land, houses, and goods and service”*.

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga yang pastinya akan berdampak negatif bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional, artinya jika pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah. Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga properti lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau. Sebagai konsekuensi logis, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga

pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian.

Sama halnya seperti yang disampaikan Kreag (2001) sebelumnya. Dampak kenaikan harga yang dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah di kawasan danau toba, akibat kegiatan pariwisata adalah naiknya harga barang, jasa, tanah dan perumahan. yang berakibat terhadap naiknya biaya hidup yang dirasakan oleh masyarakat, dan meningkatkan biaya pengadaan dan perawatan infrastruktur yang dirasakan oleh pemerintah. Bagi masyarakat, contoh konkrit yang dapat menggambarkan dampak tersebut adalah naiknya harga lahan dan perumahan, Hal ini banyak diutarakan masyarakat menggambarkan dampak kenaikan harga yang dirasakan mereka. Sebagai contoh adalah naiknya harga lahan di kawasan sekitar Tuktuk Siadong Samosir. Banyaknya usaha akomodasi yang dibangun oleh warga Negara asing diwilayah tersebut, telah mengakibatkan naiknya harga lahan yang melonjak. Berdasarkan pengakuan masyarakat setempat, para pengusaha asing tersebut berani “mematok” harga tinggi terhadap lahan-lahan yang mereka rencanakan menjadi tempat usaha mereka, dan hal tersebut berimbas terhadap harga lahan lainnya yang berada di sekitarnya. Dampak tersebut berakibat sulitnya masyarakat setempat untuk membangun rumah di wilayahnya sendiri, yang mengakibatkan mereka harus mencari lahan lain di luar wilayah tersebut. Selain itu, naiknya harga lahan juga berakibat naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai beban yang harus ditanggung masyarakat dengan naiknya NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti) terhadap lahan-lahan yang dimiliki mereka.

Perbedaan kepentingan untuk tanah antara masyarakat lokal dengan pembangunan kepariwisataan ternyata juga dapat menyebabkan benturan kepentingan. Kasus pertanahan seringkali terjadi akibat adanya benturan-benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara para pihak yang berkepentingan. Secara horizontal, di Kawasan Danau Toba, konflik ini dapat terjadi antara individu (perorangan dengan perorangan), antara saudara, antara keturunan satu keluarga besar (ahli waris), antara huta (kampung), dan antara marga. Demikian pula

konflik antara pemegang hak ulayat dan perorangan yang memperoleh sertifikat tanah. Sitorus. et. al (2016) telah melakukan survei terhadap masyarakat lokal di Kawasan Danau Toba (diwakilkan oleh 480 orang responden) mengenai kekhawatiran masyarakat akan terjadinya konflik akibat kontestasi kepemilikan lahan yang disebabkan kegiatan kepariwisataan. Berdasarkan hasil survey tersebut ditemukan bahwa 1) 72% responden khawatir akan terjadi peningkatan frekwensi dan intensitas sengketa tanah di desa mereka, sehubungan dengan semakin galaknya pembangunan pariwisata; 2) 71% responden khawatir bahwa sengketa atas tanah hak ulayat akan semakin meningkat; 3) 71,25% responden mengkhawatirkan pengembangan Kawasan Danau Toba menjadi daerah pariwisata akan diikuti dengan sengketa tanah antar keluarga, karena nilai ekonomi tanah dipandang meningkat akibat pembangunan Kawasan Danau Toba menjadi daerah wisata, dan kepemilikan tanah setiap keluarga yang relatif kecil dan kepemilikannya masih atas nama keluarga besar atau tanah adat atau tanah ulayat, bukan hak milik pribadi; 4) 69,17% responden mengkhawatirkan pengembangan Kawasan Danau Toba menjadi daerah pariwisata akan diikuti dengan sengketa tanah antar marga, karena batas-batas antar wilayah dusun dan desa ditentukan berdasarkan marga tertentu dan nilai ekonomi tanah dipandang meningkat akibat pembangunan Kawasan Danau Toba menjadi daerah wisata; 5) 73% responden khawatir akan terjadi peningkatan konflik dengan pemerintah untuk urusan tanah di kawasan Danau Toba. Karena pemerintah berpendapat bahwa mereka sebagai pemilik otoritas yang syah untuk menentukan peruntukan tanah, dan setiap konflik pertanahan dengan pemerintah akan cenderung diselesaikan melalui proses peradilan yang cenderung memenangkan pihak pemerintah; 6) 84,38% responden khawatir bahwa pengembangan Kawasan Danau Toba menjadi daerah pariwisata akan diikuti dengan sengketa tanah antara masyarakat dengan dunia usaha, karena dunia usaha memerlukan tanah untuk pengadaan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata.

4.2.3. Kepuasan Wisatawan Terhadap Pariwisata Di Kawasan Danau Toba

Weaver (2006) menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan harus menjaga tingkat kepuasan wisatawan dan memastikan para wisatawan mendapatkan pengalaman berarti, meningkatkan kepedulian mereka mengenai isu keberlanjutan, serta mempromosikan praktek pariwisata yang lestari. UNWTO (2004) menyatakan bahwa tingkat kepuasan wisatawan ketika berada di lokasi wisata, akan sangat menentukan apakah wisatawan tersebut kembali lagi, merekomendasikan tujuan ke orang lain atau sebaliknya menyarankan orang lain untuk menjauh. Oleh karena itu, isu ini menjadi sangat penting dalam menjamin keberlanjutan jangka panjang sebuah destinasi wisata.

Kepuasan wisatawan didasarkan pada berbagai faktor, termasuk atraksi yang ditawarkan oleh daerah destinasi wisata, kualitas layanan, harapan wisatawan, dan pengalaman setiap wisatawan selama tinggal disana. Banyak elemen yang mempengaruhi kepuasan wisatawan (misalnya kebersihan akomodasi, jaminan air dan makanan, keramahan perhotelan) setidaknya sebagian berada dalam lingkup pengelolaan kepariwisataan tersebut. Sedangkan elemen cuaca, kejahatan, tindakan permusuhan kurang begitu berpengaruh (UNWTO, 2004).

Survei terhadap para pengunjung mancanegara mengenai pengalaman mereka selama berkunjung ke kawasan danau toba, menjelaskan bahwa mereka cenderung puas selama berkunjung ke wilayah ini. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan mereka terhadap pernyataan-pernyataan berikut : 1) Saya menikmati pengalaman saya di sini (rata-rata 4.47 / kategori setuju); 2) Keadaan jalan membuat perjalanan mudah (skor rata-rata 3.50 / kategori netral dan setuju); 3) kawasan wisata menyediakan beragam pengalaman yang baik (skor rata-rata 4.11 / kategori setuju); 4) Kota dan desa ramai (sesak) (skor rata-rata 2.24 / kategori tidak setuju); 5) Saya memiliki pengalaman bagus yang melibatkan budaya lokal (skor rata-rata 3.74 / kategori setuju); 6) Situs budaya terpelihara dengan baik (skor rata-rata 3.87 / kategori setuju); 7) Situs budaya mudah diakses (skor rata-rata 3.97 / kategori setuju); **8) Pantai-pantai bersih (skor rata-rata 3.11 /**

kategori netral); 9) Cinderamata dan kerajinan tangan yang bagus tersedia (skor rata-rata 3.82 / kategori setuju); 10) Saya memiliki kesempatan yang baik untuk menikmati masakan lokal (skor rata-rata 4.47 / kategori setuju); 11) Kualitas makanan yang baik (skor rata-rata 4.39 / kategori setuju); 12) Kualitas akomodasi yang baik (skor rata-rata 4.32 / kategori setuju); 13) Tingkat pelayanan yang diberikan tinggi (skor rata-rata 4.34 / kategori setuju); 14) Staf layanan berkompeten dan membantu (skor rata-rata 4.37 . kategori setuju); 15) Saya terganggu oleh kondisi daerah yang dibangun dengan tidak baik (skor rata-rata 2.39 / kategori tidak setuju); 16) Saya terganggu oleh kebisingan (skor rata-rata 2.08 / kategori tidak setuju); 17) **Saya terganggu dengan sampah yang berserakan di tempat umum (skor rata-rata 2.68 / kategori netral)**; 18) Keadaan lingkungan alami bagus (Skor rata-rata 3.79 / kategori setuju); 19) Kawasan wisata memiliki pemandangan yang menarik dan bervariasi (skor rata-rata 4.58 / kategori sangat setuju); 20) Mudah untuk sampai ke kawasan wisata untuk kunjungan saya (skor rata-rata 3.76 / kategori setuju); 21) Saya merasa aman dan nyaman selama kunjungan saya (skor rata-rata 4.42 / kategori setuju); 22) Saya merasa harga-harga sudah standard dan baik (skor rata-rata 4.45 / kategori setuju); 23) Saya akan merekomendasikan kawasan wisata ini kepada teman saya (skor rata-rata 4.53/ kategori sangat setuju); dan 24) Saya akan mengunjungi kawasan wisata ini lagi (skor rata-rata 4.03 / kategori setuju).

Pernyataan para informan yang mayoritas akan merekomendasikan kawasan wisata ini kepada kerabat mereka, dan pernyataan bahwa para informan yang mayoritas menyatakan setuju untuk kembali lagi ke kawasan wisata ini, merupakan sebuah pembuktian yang tegas bahwa para informan penelitian ini mayoritas telah merasa puas pada kunjungan mereka. "Sayang sekali bila mereka (para kerabat informan) belum melihat ini", salah satu pernyataan yang dikutip dari para informan ketika mereka diwawancarai oleh peneliti, menandakan bahwa mereka ingin sekali para kerabat mereka juga melihat keindahan yang telah mereka saksikan.

Berdasarkan hasil survei tersebut juga diketahui bahwa alasan utama para responden berkunjung ke wilayah ini adalah untuk melihat kondisi alam di sekitar

danau toba. Dari survei tersebut diketahui bahwa 55.3% para informan memilih kondisi alam sebagai alasan berkunjung, diikuti dengan alasan lain-lain (26.3%), dan yang terakhir adalah untuk melihat budaya masyarakat sekitar danau toba dengan persentase sebesar 18.4%. Namun bila dilihat dari daftar kunjungan para wisatawan selama berada di kawasan ini, terlihat bahwa para wisatawan akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mengunjungi situs dan pertunjukan budaya. Hal ini dapat dilihat dari persentase responden yang memilih “ya” pada pilihan mengunjungi situs budaya dan pertunjukan budaya, yang lebih besar dari tempat-tempat yang menampilkan panorama alam. Dalam survey ini di temukan bahwa 81.6% responden menyatakan “ya” pada mengunjungi situs budaya, diikuti menghadiri pertunjukan budaya sebesar 68.4%, sedangkan untuk lokasi pegunungan, jalur alami dan pantai berada pada urutan 3, 4, dan 5. Dari informasi yang diterima dari para responden, diketahui bahwa mereka memang takjub dan tertarik untuk melihat kondisi alam yang tersaji di kawasan ini. Namun mereka tidak akan menghabiskan waktu mereka berlama-lama untuk itu. Para wisatawan akan cenderung berkeinginan untuk mengetahui dan bersentuhan dengan budaya setempat, dan berkeinginan menghabiskan waktu mereka untuk menikmati hal tersebut.

Beberapa hal yang mungkin penting mendapat perhatian dari hasil survei ini adalah pernyataan para informan yang tidak tegas menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap tingkat kebersihan pantai di sekeliling danau toba dan mengenai sampah yang berserakan di tempat-tempat umum. Hal yang mendukung data tersebut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pengunjung (baik domestik maupun mancanegara), dimana diketahui bahwa ada keengganan mereka untuk kontak langsung dengan perairan danau toba, dengan masih terlihatnya sampah dan tumbuhan eceng gondok di sekitar pantai, ditambah saluran buangan limbah air domestik dan akomodasi yang terlihat langsung mengarah ke perairan danau toba. Sebagai bukti ekstrim terkait hal tersebut adalah seperti yang terlihat di lokasi wisata Pantai Pasir Putih Parbaba Samosir yang merupakan lokasi wisata air, namun masih terlihat saluran air limbah domestik dan akomodasi yang mengalir ke arah pantai. Para informan menyampaikan

keprihatinan mereka dengan kondisi tempat-tempat umum (pasar, dermaga, termasuk beberapa lokasi wisata) yang masih tergolong kurang bersih, dimana masih terlihat sampah berserakan yang tidak luput dari perhatian para pengunjung.

Masalah lain muncul ketika peneliti bertanya mengenai penerimaan masyarakat lokal atas kunjungan mereka ke wilayah ini. Memang, wisatawan mancanegara menganggap bahwa sikap masyarakat lokal masih tergolong sesuatu yang dapat diterima. Mereka masih menggambarkan masyarakat lokal sebagai sesuatu yang berbeda, seperti yang dicontohkan oleh ucapan dua orang warga perancis yang kebetulan menumpang kendaraan peneliti menuju tempat mereka menginap di Tuk-tuk Siadong. *'The local is different, and we don't know how to explain it'*. Mereka percaya bahwa pada dasarnya masyarakat lokal ramah terhadap mereka, tapi dengan cara yang berbeda. Demikian juga pernyataan dua orang warga Austria yang ditemui peneliti di Bakkara Humbang Hasundutan. *'we found the people is good, but there's something pushed us to keep distance with them, we don't know to say that'*. Mereka menganggap memang ada masalah dengan perilaku masyarakat lokal di dalam penerimaan mereka terhadap para pengunjung, walaupun sulit untuk diungkapkan, namun mereka merasa harus tetap menjaga jarak dengan masyarakat setempat. Namun lain halnya dengan apa yang dirasakan oleh wisatawan domestik. Secara ekstrim mereka menyatakan kekecewaan mereka terhadap perilaku masyarakat sekitar. Mereka menganggap bahwa masyarakat sekitar adalah masalah. Sering mereka menyatakan bahwa mereka sangat terganggu dengan sikap yang ditunjukkan masyarakat lokal didalam penyambutan mereka. Misalnya sikap kasar yang mereka terima ketika bernegosiasi mengenai harga barang atau jasa, paksaan untuk membeli barang dagangan masyarakat, layanan yang tidak seperti diharapkan, yang seluruhnya adalah ungkapan kekecewaan atas sikap ketidakramahan dan enggan nya masyarakat lokal untuk melayani mereka dengan baik.

Ungkapan-ungkapan dari para wisatawan sebelumnya ternyata tidak sama dengan apa yang diungkapkan masyarakat ketika ditanya mengenai penyambutan atau penerimaan mereka terhadap pengunjung yang datang ke wilayah mereka.

Berdasarkan pengakuan masyarakat, mereka telah menampilkan sikap yang terbuka dan ramah kepada para wisatawan. Mereka juga mengaku bahwa telah berusaha melayani para pengunjung dengan sebaiknya. Pernyataan masyarakat lokal sebelumnya juga didukung oleh informasi yang diterima oleh peneliti dari unsur pemerintah dan swasta pengelola wisata yang menjadi informan pada penelitian ini. Berdasarkan informasi yang diterima, diketahui bahwa sebenarnya masyarakat lokal telah berusaha menunjukkan keramahtamaan mereka terhadap para pengunjung, namun masih dengan standar yang mereka tahu. dan belum dapat “diapresiasi” atau diterima sebagai hal yang telah memuaskan para pengunjung di wilayah tersebut. Ada perbedaan sikap yang diharapkan dengan realita yang diterima para pengunjung dari masyarakat lokal, dan menjadi pembatas hubungan kedua belah pihak. Di satu pihak masyarakat merasa bahwa mereka memberikan yang terbaik bagi para pengunjung, namun dilain pihak para pengunjung merasa belum mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dari masyarakat.

Perihal lain yang juga dapat dikategorikan menjadi masalah terkait tingkat kepuasan pengunjung (wisatawan) yang berada di sekitar kawasan danau toba adalah ketersediaan makanan halal. Sebagai salah satu contoh yang mungkin dapat menggambarkan permasalahan ini adalah catata-catatan seorang informan dari wisatawan mancanegara yang berasal dari Uzbekhistan yang notabene seorang muslim, yang merasa tidak diperlakukan dengan adil bila dibandingkan dengan pengunjung lain yang tidak mempermasalahkan kehalal-an makanan. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan makanan yang pasti halal, ketika dia berada di restoran yang berada di penginapan atau hotel tempat dia menginap yang jelas-jelas mencantumkan makanan-makanan yang pasti tidak halal (“pork”). Permasalahan ini jugalah yang sering disampaikan para wisatawan domestik yang mayoritas beragama islam, dan mengakibatkan mereka enggan untuk berlama-lama berada di kawasan ini. Menurut mereka, ada kesan bahwa kawasan wisata ini hanya khusus diperuntukkan bagi pengunjung yang non-muslim. Pernyataan sebelumnya dapat dirasakan peneliti ketika berada di kawasan ini. Akan sangat jarang sekali tersedia makanan yang pasti halal di penginapan atau hotel yang

menyediakan restoran bagi pengunjung yang menginap di tempat-tempat tersebut. Bila ingin mendapat yang pasti halal, para pengunjung harus mencarinya di pusat-pusat keramaian (pusat kota atau pasar) yang telah banyak diisi oleh pedagang makanan halal.

Didalam analisis yang dilakukan terkait isu kepuasan wisatawan ini, dapat dikatakan bahwa selama kunjungannya dikawasan danau toba, para wisatawan puas menikmati kondisi alam yang merupakan atraksi utama kepariwisataan di kawasan ini. Para wisatawan juga puas dengan tingkat pelayanan yang mereka terima dari para penyedia layanan akomodasi di wilayah ini. Namun, kedua hal tersebut ternyata bukanlah objek utama yang ingin mereka nikmati. Para wisatawan tidak akan menghabiskan waktu mereka berlama-lama di lokasi ini untuk menikmati kedua hal tersebut, tetapi akan lebih memilih menghabiskan waktunya untuk menikmati dan memahami budaya yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Bagi mereka budaya menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan menarik untuk dikunjungi dan dilihat. Para wisatawan memiliki harapan yang lebih besar untuk memiliki pengalaman yang bersentuhan langsung budaya lokal, yang merupakan sesuatu hal yang sulit mereka dapatkan dengan keberadaan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada isu ini. Ada pembatas yang menghalangi para wisatawan untuk mencapai ekspektasinya, yaitu ketidak-siapan di tingkat pengelolaan dan ketidak-siapan masyarakat sebagai tuan rumah yang menerima tamunya. Untuk kunjungan berdurasi singkat, berulang dan hanya untuk menikmati panorama alam saja, kepariwisataan di Kawasan Danau toba memang akan sangat memuaskan para pengunjungnya. Namun untuk kunjungan yang mengharapkan pengalaman lebih dari sekedar itu, kepariwisataan di wilayah ini akan menjadi sebuah hal yang membosankan, yang enggan untuk diulangi lagi oleh para pengunjungnya.

4.2.4. Manfaat Ekonomi Kepariwisataan Bagi Masyarakat Lokal di Kawasan Danau Toba

Secara ekonomi, wisatawan adalah konsumen barang dan penerima manfaat layanan. Dari pengeluaran yang mereka lakukan, sebagian masuk

langsung ke unit ekonomi dari industri pariwisata (perumahan, makanan, transportasi, dll), bagian lainnya masuk ke anggaran daerah atau ke dalam anggaran negara dalam bentuk biaya, pajak, dll. , dan bagian ketiga masuk ke sektor ekonomi lainnya untuk pembayaran produk yang diserahkan dan layanan yang diberikan oleh sektor-sektor ini untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat mendukung pembangunan ekonomi baik masyarakat lokal maupun ekonomi suatu negara, melalui pendapatan dari pengunjung domestik maupun mancanegara (Bunghez, 2016). Untuk mencegah dampak menuju ke arah negatif maka diperlukan suatu perencanaan yang mencakup aspek sosial dan ekonomi untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan pengembangan daerah wisata yang bersangkutan (Aryunda. 2011). Sebab menurut (UNEP & UNWTO, 2005), meskipun sektor pariwisata berkembang dengan baik secara global, dengan perputaran bisnis yang cukup tinggi. namun di negara-negara berkembang banyak usaha berupa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan keterbatasan keterampilan dan akses pasar yang terbatas mengalami kegagalan karena kurangnya penilaian dan perencanaan bisnis jangka panjang yang baik. Untuk itu, disarankan bagi pemerintah setempat dapat mengeluarkan kebijakan yang : 1) mengenal pasar; 2) memberikan kepuasan kepada para wisatawan; 3) menjaga kondisi perdagangan dengan baik; 4) menjaga dan tetap mengembangkan kondisi lokasi wisata; dan 5) memberikan dukungan pengembangan usaha.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya (pada isu dampak kegiatan pariwisata terhadap masyarakat lokal), mayoritas para responden yang berasal dari masyarakat lokal danau toba setuju bahwa pariwisata berdampak terhadap pembangunan fasilitas sosial dan penyerapan tenaga kerja, yang merupakan dampak-dampak positif perekonomian sektor wisata terhadap masyarakat. Hasil survei tersebut ternyata sama dengan hasil penelitian Sitorus. et al (2016). Didalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa dalam hal dampak terhadap perbaikan fasilitas umum dan infrastruktur, umumnya masyarakat setuju, sebesar 40,83%, dan sangat setuju, sebesar 22,50%, sehingga totalnya menjadi

63,33%, bahwa pengembangan Kawasan Danau Toba menjadi daerah pariwisata akan diikuti dengan perbaikan fasilitas umum, seperti jalan raya, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Demikian juga dalam hal ketenagakerjaan, penelitian tersebut juga menyatakan bahwa umumnya masyarakat setuju, (60,84%), bahwa salah satu manfaat dari pengembangan Kawasan Danau Toba menjadi daerah pariwisata adalah untuk penampungan tenaga kerja yang ada di sekitar Kawasan Danau Toba.

Namun Pandangan masyarakat yang optimistik tentang pengaruh pengembangan Kawasan Danau Toba menjadi daerah pariwisata terhadap peningkatan lapangan pekerjaan, tidak bisa dilepaskan dari kekhawatiran mereka tentang peluang masyarakat lokal untuk memperoleh pekerjaan dimaksud. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat, ada sikap pesimistis dari mereka mengenai kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di bidang kepariwisataan yang berlangsung di daerah mereka. Mereka mencontohkan rencana pengembangan yang sedang dilaksanakan pemerintah sekarang di danau toba. Mereka yakin bahwa bila nanti di kawasan ini banyak dibangun akomodasi-akomodasi yang berskala internasional, masyarakat lokal akan kalah bersaing dengan tenaga kerja pendatang yang datang ke wilayah ini. Mereka yakin bahwa para pengembang akan lebih percaya mempekerjakan pekerja impor daripada mereka. Sikap pesimistis tersebut ternyata juga dinyatakan oleh hasil survei Sitorus et al (2016) yang menemukan bahwa umumnya masyarakat setuju (65,21%), bahwa pengembangan Kawasan Danau Toba menjadi daerah pariwisata tidak akan menampung warga lokal bekerja di usaha pariwisata. Kekhawatiran ini disebabkan oleh kapasitas dan keterampilan warga lokal yang tidak mumpuni bekerja di industri pariwisata.

Didalam hal manfaat ekonomi secara langsung dari kegiatan pariwisata terhadap masyarakat lokal (uang wisatawan sampai langsung kepada masyarakat), pada hasil survei yang telah disampaikan sebelumnya (lihat tabel 6). Diketahui bahwa memang mayoritas masyarakat lokal yang menjadi responden didalam penelitian ini menyatakan setuju (skor rata-rata 3.69) bahwa uang para wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini sampai kepada mereka. Sama dengan hasil

tersebut, survei yang dilakukan oleh Sitorus.et.al (2016) juga menyatakan umumnya masyarakat setuju (70,41%), bahwa pengembangan Kawasan Danau Toba menjadi daerah pariwisata akan memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat yang ada di sekitar Kawasan Danau Toba. Dua hasil survei ini menjadi kontra dengan data BPS yang sampaikan sebelumnya (lihat bab 1, latar belakang) yang menyampaikan kekhawatiran terhadap nilai rata-rata PDRB perkapita masyarakat di kawasan ini yang hanya Rp. 8.534.492/tahun. Lalu berapa sebenarnya nilai uang (ekonomi) yang dapat diterima langsung oleh masyarakat lokal dari para wisatawan?.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat lokal yang membuka usaha di sekitar lokasi-lokasi wisata yang tersebar di sekitar danau toba (Taman Wisata Iman Dairi, Salib kasih Tarutung, Tuktuk Siadong, Tomok dan Parapat), diketahui bahwa memang masyarakat lokal (terutama yang membuka usaha) disekitar lokasi-lokasi wisata tersebut mendapatkan dampak ekonomi langsung (berupa uang) dengan adanya kunjungan para wisatawan ke lokasi-lokasi wisata tersebut. bukan hanya yang berdagang, juga masyarakat yang menawarkan jasa. Namun itu hanya ada pada masa-masa puncak wisata (bulan Desember, Januari dan Juli). Di Sembilan bulan selebihnya, masyarakat mengaku akan sangat sulit untuk membuka usahanya. Untuk itu, banyak dari mereka tidak membuka usaha atau menawarkan jasa mereka setiap hari dalam sepanjang tahun. untuk bulan-bulan dengan kunjungan normal, mereka cenderung hanya membuka usaha di hari sabtu dan minggu (weekend), dan akan berbuka sepanjang hari untuk masa-masa puncak wisata.

Kondisi seperti yang telah disampaikan sebelumnya merupakan hal yang sering diumpamakan dengan istilah Produk musiman. Dimana sifat pariwisata tergantung dari musim. Ketika musim sepi kunjungan, wisatawan jarang berkunjung sehingga penghasilan penduduk berkurang. Produsen yang mengandalkan kehidupan penjualannya sepenuhnya di industri pariwisata akan mengalami masalah keuangan (Aryunda, 2011). Produk musiman ini adalah salah satu dampak negatif pariwisata bila dipandang dari sisi perekonomian. Hal inilah yang mungkin menjadi pertimbangan bagi masyarakat lokal di Kawasan Danau

Toba yang enggan menggantungkan nasibnya di sektor ini. Hal ini diketahui dari hasil wawancara terhadap masyarakat. Mereka menganggap lebih baik tetap dengan profesinya masing-masing (mayoritas petani), daripada mengharapkan dari suatu yang tidak pasti. Begitu juga bagi para pemuda setempat yang lebih memilih merantau ke tempat lain daripada mengharapkan pekerjaan atau membuka usaha di sector wisata yang berlangsung diwilayah mereka.

Ekonomi kreatif adalah salah andalan dalam peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata, seperti kerajinan dan pekerjaan seni. Berdasarkan informasi yang diterima peneliti dari unsur Pemerintah (Provinsi maupun Kabupaten) bahwa telah banyak kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk menggalakkan kerajinan dan pekerjaan seni seperti tenun ulos, alat musik, patung dan lain sebagainya terhadap masyarakat lokal di kawasan ini. Pembinaan-pembinaan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata. Namun diakui, tidak banyak yang berhasil dan hampir tidak ada yang berkelanjutan. Masyarakat lokal lebih memilih kegiatan-kegiatan tersebut hanya sebagai usaha sampingan, dan tidak mau terlalu serius untuk mengelolanya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengerajin ulos yang berada di sekitar Muara dan Hutaraja, mereka tidak mengakui bahwa kesinambungan usaha yang mereka jalankan adalah dampak dari adanya kegiatan pariwisata di wilayah mereka. Pasar utama mereka bukanlah pariwisata. Konsumen utama mereka bukanlah wisatawan. Mereka menyatakan bahwa produksi mereka kebanyakan merupakan pesanan-pesanan masyarakat dan penjual ulos yang bukan berasal dari wilayah ini. Walaupun ada wisatawan yang berkunjung ketempat mereka dan membeli hasil usaha mereka hanyalah sesekali saja, dan jarang sekali terjadi. Hampir sama dengan informasi yang diterima sebelumnya dari para pengrajin, informasi yang sama juga diterima dari mayoritas pedagang barang seni (pakaian, aksesoris, kain dan lain sebagainya) di sekitar lokasi-lokasi wisata di kawasan tersebut, yang menyatakan bahwa sebenarnya hampir tidak ada barang-barang yang mereka jual merupakan hasil produksi lokal. Mereka mengakui bahwa cenderung lebih memilih mendatangkan barang

dagangan mereka dari luar kota, yang mereka jemput langsung atau diantar para distributor yang datang ke wilayah tersebut. Disamping harganya yang lebih murah, para wisatawan juga lebih cenderung lebih memilih untuk membeli barang-barang tersebut.

Informasi-informasi yang diterima peneliti dari unsur pemerintah, pengrajin seni maupun para pedagang sebelumnya juga sama dengan hasil survei yang dilakukan oleh Sitorus. et. al (2016) yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat (sebesar 73,75%), menjawab tidak ada kerajinan yang berpotensi menjadi andalan pariwisata. Menurut penelitian tersebut Hal ini wajar, karena masyarakat di sekitar Kawasan Danau Toba yang bekerja sebagai petani dan nelayan harus mengalami lompatan tahap perkembangan masyarakat. Seharusnya sebelum sampai pada tahap perkembangan masyarakat yang berkegiatan ekonomi jasa, masyarakat harus terlebih dahulu memasuki tahap perkembangan masyarakat industri. Disamping itu, tidak tersedia pula lembaga pendidikan formal serta lembaga pendidikan dan pelatihan yang bergerak di bidang pariwisata.

4.2.5. Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat yang dihasilkan kegiatan Pariwisata di Kawasan Danau Toba

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pendeskripsian kepuasan wisatawan terhadap kegiatan pariwisata di Kawasan danau Toba, yang menyatakan bahwa ada masalah didalam pengelolaan limbah padat (sampah) maupun cair di kawasan ini, yang dicirikan dengan ketidak-tegasan para wisatawan menanggapi pernyataan mengenai kondisi kebersihan pantai dan sampah yang berserakan di lokasi-lokasi wisata. Didalam pengumpulan data untuk mendeskripsikan isu ini, ditemukan bahwa memang belum ada keseriusan para stakholder terkait untuk menangani masalah ini. Misalkan saja didalam pengukuran indikator utama isu ini yaitu mengenai persentase tempat usaha pariwisata (atau akomodasi) yang memiliki sistem pengolahan air limbah. Dari informasi yang diterima dari pihak Pemerintah Daerah yang khusus membidangi kepariwisataan dan lingkungan hidup, diterima informasi bahwa bisa dipastikan bahwa seluruh usaha akomodasi di wilayah ini belum ada yang memiliki sistem

pengelolaan air limbah yang berstandar, Kecuali mungkin usaha akomodasi (hotel) yang telah berstandar internasional seperti Simalem Ressorst yang ada di Kecamatan Merek kabupaten karo dan Hotel Niagara yang berada di Parapat. Walaupun tidak dapat menunjukkan data kepada peneliti, para informan sangat yakin menyatakan kondisi tersebut.

Sebagai tindakan konfirmasi terhadap informasi yang diterima peneliti dari informan dari unsur pemerintah sebelumnya, didalam pelaksanaan observasi yang dilakukan pada usaha-usaha akomodasi yang ada di sekitar Danau Toba, memang sangat sulit mendapatkan usaha perhotelan yang telah memiliki sistem pengolahan limbah, seperti kolam-kolam penampungan dan pengendapan sebelum dilepas ke aliran air pembuangan. Umumnya usaha akomodasi yang ada di sekeliling danau toba (Parapat, Tomok, Tuk-tuk Siadong, Pangururan, Muara, Balige dan Tongging) membuang langsung air sisa aktivitasnya langsung ke saluran pembuangan yang bermuara ke danau toba.

Untuk yang berada di lokasi Parapat, sebenarnya sejak tahun 1996 telah terbangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang berlokasi di Desa Sijambur, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir dan mulai beroperasi sejak tahun 2000. IPAL ini dibangun dengan dana pinjaman dari Jepang (OECD) sebesar 7,3 milyar rupiah. Pelayanan yang direncanakan adalah untuk mengelola air limbah domestik yang berasal dari masyarakat di Kota Parapat ibukota Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dan Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir melalui sistem perpipaan yang telah terpasang sepanjang \pm 15.000 m yang dilengkapi dengan 128 buah manhole dan 3 unit stasiun pompa untuk diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dikelola oleh PDAM Tirtanadi. IPAL yang dibangun menggunakan proses mikrobiologi di atas lahan seluas 2 Ha. Kapasitas pengolahan air limbah didesain sebesar 2.000 m³/hari atau setara dengan 3.000 sambungan rumah tangga. Terdapat beberapa unit pengolahan yang terdiri dari : Kolam Aerasi, Kolam Fakultatif dan Kolam Maturasi. Masing-masing kolam aerasi dan fakultatif dilengkapi dengan aerator, sedangkan kolam maturasi tidak dilengkapi dengan aerator. Hasil akhir proses pengolahan dialirkan ke Sungai Sera-Sera.

Permasalahannya adalah, dari kapasitas 3.000 sambungan yang dapat dilayani oleh sistem ini, baru hanya 300 sambungan (10%) yang memanfaatkannya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terutama hotel-hotel dan restaurant untuk menyalurkan air limbahnya ke dalam sistem pengelolaan air limbah yang sudah disediakan dan lebih cenderung membuangnya secara langsung ke Danau Toba. Untuk tingkat akomodasi, berdasarkan informasi yang diterima ternyata hanya ada 3 (hotel) yang memanfaatkan fasilitas tersebut, yaitu Aek Sere Hotel, Hotel Darma Agung Beach, dan Hotel Inna Parapat.

Untuk limbah padat (sampah), sebenarnya telah ada usaha Pemerintah setempat untuk menanggulangi hal tersebut. Pemerintah daerah telah menyediakan sistem pengelolaan sampah khususnya di lokasi-lokasi umum seperti (pasar, tempat fasilitas transportasi dan khususnya daerah perkotaan). Pemerintah setempat telah menyediakan tempat-tempat penampungan sampah sementara, untuk lokasi penumpukan sampah dari aktifitas masyarakat. Namun hal tersebut hanya ada di pusat-pusat keramaian. Seperti yang terlihat di Muara, Balige, Parapat, Tomok, Tuktuk Siadong dan Pangururan). Sedangkan lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah peruntukan wisata lainnya yang tersebar di sekitar Danau Toba, contohnya Tongging, Bakkara, Meat, Sianjur Mula-mula dan lokasi lainnya, tidak terlihat adanya system pengelolaan sampah tersebut. berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, umumnya mereka masih mengelola sampah secara konvensional yaitu dengan mengumpul dan membakarnya. Menurut mereka belum ada program atau pembinaan dari pihak Pemerintah setempat mengenai pengelolaan sampah di lokasi-lokasi wisata tersebut.

Informasi tersebut ternyata diakui oleh Pemerintah daerah setempat. Pada saat peneliti melaksanakan pengumpulan data mengenai volume sampah dan sistem pengelolaan sampah di wilayah mereka, Pemerintah setempat mengakui bahwa mereka baru mengaplikasikan atau mengimplementasikan sistem pengololan sampah di pusat-pusat berkumpulnya masyarakat (pusat-pusat perkotaan), dan itupun belum sepenuhnya mengikuti prinsip pengelolaan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dan belum sepenuhnya terpadu.

Kondisi seperti yang disampaikan sebelumnya mengenai bagaimana kondisi pengelolaan limbah dari aktifitas kepariwisataan maupun kegiatan domestik lainnya yang berhubungan dengan limbah yang bersifat cair dan padat di Kawasan danau toba, belum ditangani dengan baik.

4.3. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba .

Secara administratif Kawasan Danau Toba berada di Provinsi Sumatera Utara. Kawasan ini mencakup bagian dari wilayah administrasi dari 7 (tujuh) kabupaten yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hansudutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Simalungun. (sejak tahun 2017, Kabupaten Pak pak Bharat telah masuk). Dengan adanya rencana percepatan pengembangan pariwisata di kawasan ini, Pemerintah pusat melalui arahan Presiden dan Kementerian terkait telah memberikan tugas kepada setiap daerah untuk agar fokus pada perbaikan destinasi pariwisata danau toba dengan mendukung dan memperkuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan, dengan bentuk konkrit adanya sebuah dokumen perencanaan berbentuk rencana aksi daerah terkait usaha percepatan tersebut.

Sejak pertengahan tahun 2016, masing-masing Kabupaten telah menyusun Rencana aksi penataan lingkungan Danau Toba dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba, dan telah dikoordinasikan dan dikonsultasikan si tingkat Provinsi. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan peneliti terhadap dokumen tersebut, rencana-rencana tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah (Bupati) masing-masing kabupaten dan telah ditetapkan sebagai Rencana aksi bersama di tingkat Provinsi, dan ditandatangani para Bupati dan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2016. Butir-butir poin rencana aksi tersebut di antaranya penghentian budi daya Keramba Jarung Apung (KJA), peningkatan kualitas air Danau Toba, penghentian penebangan hutan, kegiatan rehabilitasi hutan, penataan tata batas hutan, peningkatan pariwisata, penataan

pelaku usaha, penataan sumber daya air, pembangunan sarana transportasi dan pengadaan sarana dan prasarana air limbah.

Dengan adanya rencana aksi tersebut, dan telah disepakatinya rencana tersebut sebagai rencana bersama daerah setiap Kabupaten bersama dengan Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, tentunya menjadi sebuah langkah besar dalam usaha percepatan penataan lingkungan dan pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba. Bukan hanya karena hadirnya kebijakan, namun telah terbangunnya koordinasi antar daerah yang selama ini merupakan sebuah masalah besar didalam usaha pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba.

Langkah penting didalam pencapaian tujuan sebuah kebijakan adalah implementasi kebijakan tersebut. Sebab, sebuah kebijakan hanya merupakan lembaran dokumen bila tidak terimplementasi dengan baik dilapangan. Dengan telah ditetapkannya rencana aksi bersama Pemerintah Daerah terkait penataan lingkungan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba, hal terpenting berikutnya yang penting diketahui peneliti adalah bagaimana para pelaksana kebijakan mengimplementasikan dan mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Didalam observasi yang dilakukan peneliti, hal pertama yang menjadi objek perhatian adalah bagaimana Pemerintah daerah Kabupaten menghentikan budidaya ikan KJA. Sebab hal ini adalah topik utama yang menjadi perhatian di dalam rencana aksi tersebut. Diawal tahun 2017, dimana penelitian ini mulai dilaksanakan memang telah ada terlihat perubahan. Misalnya keberadaan KJA di sekitar Huta Sualan Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Parapat dan di sekitar Haranggaol Kabupaten Simalungun yang sudah berkurang jumlahnya. Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak Bappeda, Pemerintah Kabupaten yang bekerja sama dengan TNI dan Polri telah melakukan pendekatan dan mengajak masyarakat untuk menutup usaha budidaya ikan KJA-nya dan beralih ke pertanian darat. Berdasarkan wawancara tersebut juga diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun tenagh berusaha berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengkorvesi

status wilayah hutan lindung di sekitar daerah tersebut, agar dapat dimanfaatkan masyarakat bekas petani budidaya ikan KJA yang telah di tutup.

Namun di sekitar pertengahan tahun 2017, terlihat bahwa KJA marak kembali di wilayah tersebut. Masyarakat yang semula tidak beroperasi lagi telah mulai membuka usaha budidaya ikannya kembali. Berdasarkan informasi yang diterima peneliti, masyarakat tidak tahan lagi dengan desakan ekonomi yang mereka rasakan sejak ditutupnya budidaya ikan KJA, yang merupakan sumber pendapatan mereka selama ini, ditambah kekecewaan mereka dengan belum adanya jalan keluar mengenai peralihan mata pencarian mereka menjadi petani di darat seperti yang dijanjikan Pemerintah Daerah selama ini. Informasi ini juga diakui pihak Pemerintah Daerah yang menyatakan belum adanya titik terang permohonan peralihan status lahan di hutan lindung dari pihak pihak KLHK, yang dimohonkan pihak Pemerintah Kabupaten. Pekerjaan Pemerintah juga bertambah banyak dengan adanya gugatan balik beberapa perusahaan yang telah dibatalkan izin usaha KJA-nya oleh pihak Pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menempatkan posisi Pemerintah Kabupaten menjadi serbah salah.

Terkait usaha peningkatan pariwisata yang juga menjadi topik utama didalam kebijakan tersebut, dan merupakan tema penelitian ini, dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sekitar Danau Toba telah menetapkan rencana-rencana kerja pengembangan yang bila dikelompokkan menjadi beberapa jenis kegiatan, yaitu pembukaan/perbaikan jalan wisata yang merupakan bagian dari jalan kabupaten dan Kecamatan , penataan destinasi, pelaksanaan even-even budaya, perbaikan situs budaya, dan peningkatan promosi. Rencana usaha tersebut juga didukung oleh kegiatan-kegiatan perbaikan yang berasal dari satuan-satuan kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi, yang sepanjang tahun 2017 ini telah banyak dilaksanakan di wilayah ini. Walaupun belum sepenuhnya menyentuh seluruh permasalahan yang teridentifikasi didalam penelitian ini, yang merupakan tantangan-tantangan didalam usaha mewujudkan keberlanjutan kepariwisataan di wilayah ini, adanya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan sebagian sudah terlaksana di lapangan tersebut, sudah menjadi petunjuk

adanya komitmen Pemerintah Daerah Setempat untuk memajukan sector kepariwisataan di wilayah mereka.

4.4. Usulan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Danau Toba.

“Effective governance, policies and tools are the bedrock of sustainable tourism” (UNWTO, 2017). Pernyataan tersebut merupakan sebuah ungkapan yang menyatakan, bahwa pondasi dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah perangkat kebijakan penatakelolaan yang baik dari Pemerintah. UNEP & UNWTO (2005) menyatakan bahwa Pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata agar lebih berkelanjutan. Alasan utamanya adalah : 1) Agenda keberlanjutan sebagian besar berada di wilayah publik. Meskipun sektor swasta mulai menyadari tanggung jawabnya, namun tidak dapat diharapkan untuk menangani isu-isu ini; 2) Sektor pariwisata terbagi atas begitu banyak urusan yang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, sehingga memerlukan koordinasi; dan 3) Pemerintah memiliki banyak fungsi yang secara mendasar penting bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti perencanaan penggunaan lahan, peraturan ketenagakerjaan dan lingkungan, penyediaan infrastruktur layanan sosial dan lingkungan.

UNWTO & EC (2013) menyatakan bahwa hal penting yang harus dilakukan pemerintah di dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di tingkat nasional adalah : 1) Meyakinkan publik bahwa pariwisata berkelanjutan akan mendorong pembangunan; 2) Memastikan bahwa setiap kementerian yang terkait menjalankan program yang mendukung pariwisata berkelanjutan, dengan membentuk sebuah kelompok koordinasi; 3) Membentuk badan lintas sektor pariwisata yang melibatkan swasta dan masyarakat; dan 4) Menyediakan sumberdaya manusia dan keuangan yang memadai. Untuk tingkat pemerintah Daerah, sebagai ujung tombak yang paling berperan di dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan memiliki peran kunci dalam memberikan kepemimpinan, dan berbagai fungsi penting untuk keberhasilan pengembangan dan promosi pariwisata, serta pengelolaan dampaknya. Pemerintah daerah

memiliki tugas : 1) Memastikan koordinasi yang efektif antara fungsi mereka dalam hal pengembangan, promosi dan pengelolaan pariwisata dan harus menyediakan struktur yang diperlukan untuk memastikan koordinasi tersebut; 2) membangun badan koordinasi lintas sektor yang terlibat didalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan, termasuk keberlanjutan tujuan, dan bukan semata-mata berfokus pada pemasaran; 3) Menyediakan sumberdaya manusia dan keuangan yang memadai; dan 4) membangun partisipasi dan konsultasi “bottom up” dengan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, terkait penanganan permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya didalam penelitian ini, pendekatan utama yang diusulkan adalah adanya koordinasi yang baik diantara pemangku kepentingan. Sebab didalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dibutuhkan kerja sama. Tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilaksanakan oleh unsur Pemerintah saja, namun mengikutsertakan semua unsur terkait didalam pengembangannya.

Berdasarkan pendeskripsian kondisi pengelolaan kepariwisataan di kawasan Danau Toba yang dilakukan sebelumnya terhadap 5 (lima) isu utama pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu 1) kepuasan masyarakat lokal; 2) Dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal; 3) kepuasan wisatawan; 4) manfaat ekonomi pariwisata terhadap masyarakat; dan 5) pengelolaan limbah cair dan limbah padat. Ditemukan 13 (tiga belas) masalah yang menjadi tantangan utama pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan ini (disajikan pada tabel 9), Merujuk pembedaan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh UNEP & UNWTO (2005). Masalah-masalah tersebut berkumpul di 5 (lima) bidang kebijakan (lihat tabel 10), yaitu kebijakan mengenai : 1) bagaimana meningkatkan perekonomian dengan adanya kegiatan pariwisata; 2) bagaimana menjamin kesejahteraan daerah dan masyarakat lokal; 3) bagaimana memenuhi kepuasan pengunjung; 4) bagaimana memastikan keterlibatan masyarakat lokal di dalam pengelolaan kepariwisataan; dan 5) bagaimana menjamin lingkungan tetap lestari. Pengelompokan ini penting

dilakukan, untuk menentukan arahan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Tabel. 9. Daftar Masalah Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Danau Toba

No	Masalah
1	Keterlibatan masyarakat yang terbatas di dalam perencanaan pengembangan pariwisata
2	Meningkatnya harga barang dan jasa akibat aktifitas kepariwisataan
3	Ancaman konflik lahan
4	Kondisi kebersihan lingkungan yang tidak baik
5	Ketidaksiapan masyarakat lokal sebagai tuan rumah di sebuah destinasi wisata
6	Terbatasnya akses wisatawan untuk menikmati budaya lokal
7	Terbatasnya akses wisatawan muslim terhadap makanan halal
8	Sikap pesimistis masyarakat lokal dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang kepariwisataan
9	Kalah bersaingnya produk usaha masyarakat lokal
10	Pariwisata sebagai produk musiman
11	Kecilnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah
12	Kecilnya dampak ekonomi langsung kepariwisataan bagi masyarakat lokal
13	Belum adanya sistem pengelolaan limbah (cair dan padat) yang baik

sumber : data penelitian, 2017

Didalam perumusan usulan kebijakan, referensi lain yang digunakan peneliti adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 tahun 2016, tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Peraturan ini merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan. Di dalam Peraturan Menteri ini telah ditentukan kriteria, indikator dan bukti pendukung yang menyatakan bahwa sebuah destinasi wisata telah dikelola secara berkelanjutan. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu di destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan dari kriteria di destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan. Bukti pendukung adalah sesuatu yang menyatakan suatu kebenaran peristiwa, keterangan nyata atau tanda baik *softcopy* atau *hardcopy* di destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat diketahui apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan usaha pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di sebuah destinasi. Rumusan kebijakan terkait masalah pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan danau Toba dapat dilihat pada tabel 11. Sedangkan penanggung jawab atau pelaksana setiap kebijakan yang diusulkan pada penelitian ini, ditawarkan seperti yang tersaji pada tabel 12.

Tabel 10. Pengelompokan masalah pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan danau toba berdasarkan bidang kebijakan.

No	Butir masalah	Kebutuhan Kebijakan	Arah kebijakan (UNEP & UNWTO, 2005)
1	11,12	Meningkatkan perekonomian dengan adanya kegiatan pariwisata di Kawasan Danau Toba	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami pasar 2. Menjaga kondisi perdagangan 3. Memelihara dan mengembangkan atraksi-atraksi wisata
2	8,9,10	Menjamin kesejahteraan daerah dan masyarakat local dengan adanya kegiatan kepariwisataan di kawasan Danau Toba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menekan kebocoran ekonomi 2. Mengutamakan produk lokal 3. Mempengaruhi tingkat pengeluaran (belanja) pengunjung
3	5,6,7	Memenuhi kepuasan pengunjung di Kawasan Danau Toba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akses yang luas bagi pengunjung 2. Menjaga kenyamanan dan keselamatan pengunjung 3. Monitoring tingkat kepuasan wisatawan
4	1,2,3	Memastikan keterlibatan masyarakat lokal di dalam pengelolaan kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pemberdayaan masyarakat lokal 2. Memperbaiki partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan 3. Menjamin posisi masyarakat adat
5	4,13	Menjamin lingkungan di kawasan wisata Danau Toba tetap lestari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi penggunaan bahan kimia yang merusak lingkungan 2. Mengurangi pembuangan limbah ke lingkungan 3. Menekan jumlah limbah dan menyediakan “<i>disposal area</i>” yang baik 4. Mengawasi pembangunan fasilitas wisata yang baru

Tabel 11. Rumusan kebijakan terkait masalah pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan danau Toba

Kebutuhan kebijakan	Arah kebijakan	Usulan kebijakan
meningkatkan perekonomian dengan adanya kegiatan pariwisata	memahami pasar; menjaga kondisi perdagangan, memelihara dan mengembangkan atraksi-atraksi wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disusun dan dikembangkannya sistem monitoring dan evaluasi pasar yang terintegrasi dengan indikator yang jelas; 2. Memiliki data kunjungan wisatawan dan kontribusi ekonomi secara langsung dan tidak langsung 3. Memiliki kalender even/kegiatan wisata sepanjang tahun; 4. Memiliki daftar inventarisasi dan klasifikasi aset dan atraksi pariwisata terkini, termasuk situs alam dan budaya. 5. memiliki rencana Strategis dan Program Pengembangan Destinasi 6. Memiliki strategi promosi yang akurat dan mengandung pesan bahwa destinasi sudah menerapkan prinsip-prinsip destinasi yang berkelanjutan. 7. Terdapat kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah dan industri pariwisata untuk mempromosikan destinasi. 8. Destinasi memiliki rencana tata ruang dan wilayah yang mengatur zonasi peruntukan daerah tujuan wisata, termasuk area yang diperuntukan untuk tema-tema wisata alam, budaya, perkotaan, agrowisata dan sebagainya.
menjamin kesejahteraan daerah dan masyarakat lokal	menekan kebocoran ekonomi, mengutamakan produk lokal, dan mempengaruhi tingkat pengeluaran (belanja) pengunjung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Perda yang menjamin adanya kesempatan kerja dan sistem penggajian sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan berusaha mengelola obyek wisata yang sama bagi semua dan masyarakat lokal/adat; 2. Dinas terkait melaksanakan program promosi dan pengembangan produk lokal, misalnya pelatihan

		<p>kewirausahaan, akses keuangan dan akses pasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perbankan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 4. Memiliki program yang mempromosikan penyerapan produk lokal, misalnya hasil pertanian, cinderamata dan lain-lain, melalui sektor pariwisata 5. Kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan membentuk kelompok binaan baik dalam bentuk hibah, <i>corporate social responsibilities</i> (CSR) dan lain sebagainya. 6. Penggunaan produk lokal sebagai komoditas utama 7. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi mitra bisnis pariwisata
memenuhi kepuasan pengunjung	menyediakan akses yang luas bagi pengunjung; menjaga kenyamanan dan keselamatan pengunjung dan monitoring tingkat kepuasan wisatawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki program pendidikan dan penyadaran masyarakat; 2. Disbudpar tingkat Provinsi/Kabupaten melaksanakan program sadar wisata secara rutin 3. Memiliki data kunjungan dan kepuasan wisatawan untuk ditindaklanjuti sebagai kebijakan. 4. Adanya bagian khusus yang menangani keluhan pengunjung. 5. Tersertifikasinya destinasi/usaha pariwisata oleh lembaga sertifikasi 6. Memiliki pos keamanan dan P3K di lokasi-lokasi wisata utama 7. Tersedia informasi interpretatif bagi pengunjung di kantor penerangan wisata dan di situs alam dan budaya. Informasi yang tersedia dikemas dalam bentuk fisik yang menarik; barang cetakan seperti poster, buku panduan, brosur dan sebagainya yang bermanfaat bagi pengunjung 8. Destinasi memfasilitasi pelatihan dan memiliki pemandu wisata yang fasih dalam menyampaikan informasi

		interpretative
memastikan keterlibatan masyarakat lokal di dalam pengelolaan kepariwisataan	memastikan pemberdayaan masyarakat lokal, memperbaiki partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan menjamin posisi masyarakat adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pedoman/Perda tentang tata guna lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran yang memuat aspirasi masyarakat. 2. Memiliki pedoman/Perda, hukum adat atau kearifan lokal yang mengatur tentang akuisi properti dan penggunaan lahan adat/tradisional 3. Adanya pengaturan turunan dengan payung hukum Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait pengaturan hak ulayat atau tanah adat 4. Memiliki Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), Pengelola Destinasi atau Forum Rembug yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat 5. Terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat lokal
menjamin lingkungan tetap lestari	mengurangi penggunaan bahan kimia yang merusak lingkungan; Mengurangi pembuangan limbah ke lingkungan; menekan jumlah limbah dan menyediakan “disposal area” yang baik; dan mengawasi pembangunan fasilitas wisata yang baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakannya penegakan hukum terhadap peraturan dampak lingkungan, ekonomi dan sosial 2. asesmen terhadap dampak lingkungan, ekonomi dan sosial 3. Standar/Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah/limbah 4. Destinasi memiliki sistem pengelolaan untuk memonitor dampak dan melindungi ekosistem, lingkungan dan spesies yang sensitif. Sistem tersebut berjalan dengan efektif dan konsisten serta diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan 5. Destinasi memiliki program untuk mengukur, memonitor, mengurangi dan melaporkan penggunaan air kepada public 6. Terdapat sistem pengelolaan untuk memonitor dan

		<p>melaporkan kualitas air minum dan air di tempat rekreasi kepada publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Terdapat peraturan dalam menempatkan, memelihara dan menguji debit dari septic tank dan sistem pengolahan air, dan bukti tindakan penegakannya 8. Terdapat peraturan untuk memastikan ukuran dan jenis pengolahan limbah air yang sesuai untuk lokasi tersebut dan bukti tindakan penegakannya 9. Terdapat program untuk membantu perusahaan untuk mengolah dan menggunakan kembali limbah air secara efektif 10. Terdapat organisasi yang bertanggungjawab melakukan monitoring terhadap pengolahan limbah air pada destinasi. 11. Terdapat inisiatif untuk membuat sistem pengumpulan sampah yang dilakukan dengan mencatat jumlah limbah yang dihasilkan 12. Terdapat perencanaan pengelolaan sampah yang diterapkan, dan memiliki tujuan kuantitatif untuk meminimalkan dan memastikan pengelolaan yang aman dan berkelanjutan untuk sampah yang tidak digunakan kembali atau didaur ulang. 13. Terdapat program untuk membantu perusahaan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah 14. Terdapat program untuk mengurangi penggunaan botol plastik air oleh perusahaan dan pengunjung 15. Terdapat organisasi yang bertanggungjawab melakukan monitoring terhadap pengolahan sampah pada destinasi
--	--	--

Tabel 12. Penanggung Jawab Atau Implementor Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Danau Toba

No	Instansi	Tanggung Jawab
1.	Balitbang dan Bappeda Prov/Kab, Perguruan tinggi Negeri/Swasta	1. menyusun dan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pasar pariwisata yang terintegrasi dengan indikator yang jelas;
2	Dinas pariwisata Prov/Kab	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun data kunjungan wisatawan dan kontribusi ekonomi secara langsung dan tidak langsung 2. menyusun kalender even/kegiatan wisata sepanjang tahun; 3. menyusun daftar inventarisasi dan klasifikasi aset dan atraksi pariwisata terkini, termasuk situs alam dan budaya. 4. menyusun rencana Strategis dan Program Pengembangan Destinasi 5. melaksanakan program sadar wisata secara rutin 6. membentuk bagian khusus yang menangani keluhan pengunjung. 7. mengusahakan tersertifikasinya destinasi/usaha pariwisata oleh lembaga sertifikasi 8. menyediakan informasi interpretatif bagi pengunjung di kantor penerangan wisata dan di situs alam dan budaya. Informasi yang tersedia dikemas dalam bentuk fisik yang menarik; barang cetakan seperti poster, buku panduan, brosur dan sebagainya yang bermanfaat bagi pengunjung 9. memfasilitasi pelatihan dan memiliki pemandu wisata yang fasih dalam menyampaikan informasi interpretative

		10. membentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), Pengelola Destinasi atau Forum Rembug yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat 11. membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat lokal
3.	Bappeda Prov/Kab; Dinas Pariwisata Prov/Kab	1. menyusun rencana tata ruang dan wilayah yang mengatur zonasi peruntukan daerah tujuan wisata, termasuk area yang diperuntukan untuk tema-tema wisata alam, budaya, perkotaan, agrowisata dan sebagainya
	Dinas Pariwisata Prov/kab; Badan promosi Prov/Kab; Perusahaan wisata	1. Menyusun strategi promosi yang akurat dan mengandung pesan bahwa destinasi sudah menerapkan prinsip-prinsip destinasi yang berkelanjutan.
	Dinas Pariwisata Prov/kab; Dinas pendidikan Prov/kab; Organisasi keagamaan; Perguruan tinggi negeri/swasta	1. menyusun program pendidikan dan penyadaran masyarakat
	Dinas Tenaga Kerja Prov/Kab; Dinas pariwisata Prov/Kab	1. Menyusun Perda yang menjamin adanya kesempatan kerja dan sistem penggajian sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan berusaha mengelola obyek wisata yang sama bagi semua dan masyarakat lokal/adat
	Dinas Perindustrian Prov/Kab; Badan Promosi Prov/Kab; Dinas Koperasi Prov/Kab; Perbankan;	1. melaksanakan program promosi dan pengembangan produk lokal, misalnya pelatihan kewirausahaan, akses keuangan dan akses pasar 2. menyusun program yang mempromosikan penyerapan produk lokal, misalnya hasil pertanian, cinderamata dan lain-lain, melalui sektor pariwisata 3. membentuk kelompok binaan baik dalam bentuk hibah, <i>corporate social responsibilities (CSR)</i> dan lain sebagainya. 4. mendorong penggunaan produk lokal sebagai komoditas utama 5. Mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi mitra bisnis pariwisata
	Perbankan	1. memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada usaha-usaha masyarakat lokal.
	Satuan Pamong Praja Kabupaten	1. membentuk pos keamanan dan P3K di lokasi-lokasi wisata utama

	Biro pemerintahan Prov; Bagian Pemerintahan Kab; Bappeda Prov/Kab; Dinas PUPR Prov/Kab;	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun pedoman/Perda tentang tata guna lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran yang memuat aspirasi masyarakat. 2. menyusun pedoman/Perda, hukum adat atau kearifan lokal yang mengatur tentang akuisi properti dan penggunaan lahan adat/tradisional 3. menyusun pengaturan turunan dengan payung hukum Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait pengaturan hak ulayat atau tanah adat
	Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan penegakan hukum terhadap peraturan dampak lingkungan
	Dinas lingkungan hidup Prov/Kab	<ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan asesmen terhadap dampak lingkungan, ekonomi dan sosial 2. menyusun Standar/Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah/limbah 3. menyusun sistem pengelolaan untuk memonitor dampak dan melindungi ekosistem, lingkungan dan spesies yang sensitif. Sistem tersebut berjalan dengan efektif dan konsisten serta diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan 4. menyusun program untuk mengukur, memonitor, mengurangi dan melaporkan penggunaan air kepada public 5. menyusun sistem pengelolaan untuk memonitor dan melaporkan kualitas air minum dan air di tempat rekreasi kepada publik. 6. menyusun peraturan dalam menempatkan, memelihara dan menguji debit dari septic tank dan sistem pengolahan air, dan bukti tindakan penegakannya 7. menyusun peraturan untuk memastikan ukuran dan jenis pengolahan limbah air yang sesuai untuk lokasi tersebut dan bukti tindakan penegakannya 8. menyusun program untuk membantu perusahaan untuk mengolah dan menggunakan kembali limbah air secara efektif 9. melakukan monitoring terhadap pengolahan limbah air pada destinasi. 10. membuat sistem pengumpulan sampah yang dilakukan dengan mencatat jumlah limbah yang dihasilkan 11. menyusun perencanaan pengelolaan sampah yang diterapkan, dan memiliki tujuan kuantitatif untuk meminimalkan dan memastikan pengelolaan yang aman dan

		<p>berkelanjutan untuk sampah yang tidak digunakan kembali atau didaur ulang.menyusun program untuk membantu perusahaan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah</p> <p>12. menyusun program untuk mengurangi penggunaan botol plastik air oleh perusahaan dan pengunjung</p> <p>13. bertanggungjawab melakukan monitoring terhadap pengolahan sampah pada destinasi</p>
--	--	--

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengukuran indikator-indikator utama dari 5 isu utama pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu a) Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pariwisata; b) Dampak kegiatan pariwisata terhadap masyarakat lokal; c) Kepuasan wisatawan; d) Manfaat ekonomi dari pariwisata; dan e) Pengelolaan limbah cair dan limbah padat. Terdapat 13 (tiga belas) permasalahan yang menjadi tantangan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba, antara lain : 1) Keterlibatan masyarakat yang terbatas di dalam perencanaan pengembangan pariwisata; 2) Meningkatnya harga barang dan jasa akibat aktifitas kepariwisataan; 3) Ancaman konflik lahan; 4) Kondisi kebersihan lingkungan yang tidak baik; 5) Ketidaksiapan masyarakat lokal sebagai tuan rumah di sebuah destinasi wisata; 6) Terbatasnya akses wisatawan untuk menikmati budaya lokal; 7) Terbatasnya akses wisatawan muslim terhadap makanan halal; 8) Sikap pesimistis masyarakat lokal dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang kepariwisataan; 9) Kalah bersaingnya produk usaha masyarakat lokal; 10) Pariwisata sebagai produk musiman; 11) Kecilnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah; 12) Kecilnya dampak ekonomi langsung kepariwisataan bagi masyarakat lokal; dan 13) Belum adanya sistem pengelolaan limbah (cair dan padat) yang baik.
2. Kebijakan yang dibutuhkan didalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Danau Toba adalah: 1) Meningkatkan perekonomian dengan adanya kegiatan pariwisata di Kawasan Danau Toba, dengan arahan kebijakan : a) memahami pasar; b) menjaga kondisi

perdagangan; dan c) memelihara dan mengembangkan atraksi-atraksi wisata; 2) Menjamin kesejahteraan daerah dan masyarakat lokal dengan adanya kegiatan kepariwisataan di kawasan Danau Toba, dengan arah kebijakan : a) menekan kebocoran ekonomi; b) mengutamakan produk lokal; dan c) mempengaruhi tingkat pengeluaran (belanja) pengunjung; 3) Memenuhi kepuasan pengunjung di Kawasan Danau Toba, dengan arah kebijakan : a) menyediakan akses yang luas bagi pengunjung; b) menjaga kenyamanan dan keselamatan pengunjung; dan c) monitoring tingkat kepuasan wisatawan; 4) memastikan keterlibatan masyarakat lokal di dalam pengelolaan kepariwisataan, dengan arah kebijakan: a) memastikan pemberdayaan masyarakat lokal; b) memperbaiki partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan; dan c)menjamin posisi masyarakat adat; dan 5) Menjamin lingkungan di kawasan wisata Danau Toba tetap lestari, dengan arah kebijakan : a) mengurangi penggunaan bahan kimia yang merusak lingkungan; b) mengurangi pembuangan limbah ke lingkungan; c) menekan jumlah limbah dan menyediakan “*disposal area*” yang baik; dan d) mengawasi pembangunan fasilitas wisata yang baru.

5.2. Rekomendasi

1. Agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur) dan Pemerintah Kabupaten (Para Bupati) di sekitar Danau Toba memastikan koordinasi yang efektif antara fungsi mereka, dengan membangun badan koordinasi lintas sektor yang terlibat didalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan, termasuk keberlanjutan program pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Danau Toba.
2. Agar Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten di sekitar danau toba melalui badan koordinasi lintas sektor menyusun rencana pengembangan pariwisata berkelanjutan tahun jamak (jangka pendek, menengah dan jangka panjang) di Kawasan Danau Toba.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryunda, 2011. Dampak Ekonomi Pengembangan Kawasan Ekowisat Kepulauan Seribu. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 22 No. 1, April 2011, hlm.1 – 16
- Baker, S., 2006. *Sustainable Development*, Routledge 270 Madison Ave, New York, NY 10016.
- Bunghez, C.L., 2016. The Importance of Tourism to a Destination's Economy. *Journal of Eastern Europe Research in Business and Economic*, 2016.
- Choi, S.H., 2013. "The impacts of tourism and local residents' support on tourism development: a case study of the rural community of Jeongseon, Gangwon Province, South Korea." *AU-GSB e-journal*, 6 (1).
- Ekanayake, E.M., 2012. Tourism Development and Economic Growth in Developing Countries. *The International Journal of Business and Finance Research*, 6(1), pp.51–63.
- Elliott, J.A., 2006. *An Introduction to Sustainable Development*, Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN.
- Fandeli, C. Dan Nurdin, M. 2005. *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional*. UGM. Yogyakarta
- Hadi, S. P. 2007. *Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)*. Makalah Seminar Sosialisasi Sadar Wisata "Edukasi Sadar Wisata bagi Masyarakat di Semarang
- Kemenpar, 2016. *Pembangunan destinasi pariwisata prioritas 2016 - 2019*. Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata "Akselerasi Pembangunan Kepariwisata dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta". Wisnus 2016".
- Kreag, G., 2001. *The Impacts of Tourism*. Minnesota Sea Grant, (T 13), pp.1–20. Available at: www.seagrants.umn.edu.
- Lu, J. & Nepal, S.K., 2009. Sustainable tourism research: an analysis of papers published in the *Journal of Sustainable Tourism*. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(1), pp.5–16. Available at: <http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rsus20>

- Lumbanraja, V., 2012. Tourism Area Life Cycle in Lake Toba. *Indonesian Journal of Geography*, 44(2). Available at: <http://www.jurnal.ugm.ac.id/index.php/ijg/article/viewFile/2396/2152>.
- Maulana, S. & Suswati, S., 2014. Interpretasi Elemen Vernakular pada Tata Ruang Kawasan sebagai Implementasi Regionalisme Kritis. *Jurnal Tataloka*, 16(1), p.29. Available at: <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/tataloka/article/view/24>.
- Ramly, N. 2007. *Pariwisata Berwawasan Lingkungan*. Grafindo Khazanah Ilmu. Jakarta.
- Rogers, P.P., Jalal, K.F. & Boyd, J.A., 2008. *An Introduction To Sustainable Development*, Glen Educational Foundation, Inc.
- Shiji.O, 2016. Tourism And Environmental Degradation : a Threat To World's Economic Development. *EPRA International Journal Of Economic and Business review*, 4 no.(January), pp.112–117.
- Simpson, M.C., 2007. An integrated approach to assess the impacts of tourism on community development and sustainable livelihoods. *Community Development Journal*, 44(2), pp.186–208.
- Sitorus. et. al, 2016. *Membangun Pariwisata Yang Bermartabat Dan Berkelanjutan Di Kawasan Danau Toba*. Bina Media Perintis. Medan
- UNEP-UNWTO, 2005. Making tourism more sustainable. A guide for policy makers, Available at: <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Makin+Tourism+More+Sustainable:+A+Guide+for+Policy+Makers#0>.
- UNWTO, 2004. *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations*,
- UNWTO & EC, 2013. *Sustainable Tourism for Development Guidebook*. First Edition. UNWTO Madrid (Spain)
- UNWTO, 2017. *Discussion Paper on the occasion of the International Year of Sustainable Tourism for Development* . April 2017
- Wardani & Nasution, 2016. *Kontribusi Pengembangan Pariwisata Danau Toba Melalui Skema BOP (Badan Otorita Pariwisata) Bagi Masyarakat Di Sekitar Danau Toba*. <https://www.researchgate.net/publication/311451871>
- Weaver, D., 2006. *Sustainable Tourism: Theory and Practice* First Publ., 30 Corporate Drive, Burlington, MA 01803: Elsevier Butterworth-Heinemann. Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP.
- Yazdi, S. khoshnevis, 2012. Sustainable Tourism. *American International Journal of Social Science*, 1(1), pp.50–55.

Zaei, M.E. & Zaei, M.E., 2013. the Impacts of Tourism Industry on Host Community. *European Journal of Tourism Hospitality and Research*, 1(2), pp.12–21.

Zainal, Sagala, & Armayanti, 2016. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Daya Saing Pariwisata Di Kawasan Geopark Danau Toba. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 16 No. 1, Februari 2016: 1-9

Aturan perundang-undangan yang ditinjau

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025.
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya
4. Peraturan Presiden (Perpres) 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 tahun 2016, tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
6. Surat Sekretariat Kabinet Nomor B-652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016.

INSTRUMEN PENELITIAN

Apa alasan anda berknjung ke kawasan wisata ini?

Apakah ini kunjungan pertamamu? Ya, tidak. Kalau iya, kapan kamu terakhir di sini? -----

Anda berkunjung kemari untuk :

Mengunjungi pantai	Ya	Tidak
Mengunjungi pegunungan	Ya	Tidak
Berjalan di jalur alami	Ya	Tidak
Menghadiri konferensi	Ya	Tidak
Kunjungi kerabat	Ya	Tidak
Kunjungi situs budaya	Ya	Tidak
Melakukan bisnis	Ya	Tidak
Menghadiri pertunjukan budaya	Ya	Tidak
Berpartisipasi dalam _	Ya	Tidak

Apakah itu alasan utama kunjungan anda?

Di mana Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda? (Buat satu jawaban)

(Pertanyaan lanjutan yang mungkin diajukan untuk dimana tepatnya responden tinggal -----

- resor, hotel, atau komunitas tertentu).

Tolong jawab pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai:

- 1 Saya sangat tidak setuju
- 2 tidak setuju
- 3 Netral
- 4 Setuju
- 5 Sangat Setuju

Lingkari jawaban terbaik

- Saya menikmati pengalaman saya di sini 1 2 3 4 5
- Keadaan jalan membuat perjalanan mudah 1 2 3 4 5
- kawasan wisata menyediakan beragam pengalaman yang baik 1 2 3 4 5
- Kota dan desa ramai 1 2 3 4 5
- Saya memiliki pengalaman bagus yang melibatkan budaya lokal 1 2 3 4 5
- Situs budaya terpelihara dengan baik 1 2 3 4 5
- Situs budaya dapat diakses 1 2 3 4 5
- Pantai-pantai bersih 1 2 3 4 5
- Kado dan kerajinan tangan yang bagus tersedia 1 2 3 4 5
- Saya memiliki kesempatan yang baik untuk menikmati masakan lokal 1 2 3 4 5
- Kualitas makanan yang baik 1 2 3 4 5
- Kualitas akomodasi yang baik 1 2 3 4 5
- Tingkat pelayanan yang diberikan tinggi 1 2 3 4 5
- Staf layanan berkompeten dan membantu 1 2 3 4 5
- Saya terganggu oleh kondisi daerah yang dibangun dengan tidak baik 1 2 3 4 5
- Saya terganggu oleh kebisingan 1 2 3 4 5
- Saya terganggu dengan sampah yang bberserakan di tempat umum 1 2 3 4 5
- Keadaan lingkungan alami bagus 1 2 3 4 5
- Kawasan wisata memiliki pemandangan yang menarik dan bervariasi 1 2 3 4 5
- Mudah untuk sampai ke kawasan wisata untuk kunjungan saya 1 2 3 4 5
- Saya merasa aman dan nyaman selama kunjungan saya 1 2 3 4 5
- Saya merasa harga-harga sudah standard dan baik 1 2 3 4 5
- Saya akan merekomendasikan kawasan wisata ini kepada teman saya 1 2 3 4 5
- Saya akan mengunjungi kawasan wisata ini lagi 1 2 3 4 5

Apakah ada kegiatan yang anda harapkan dari kawasan wisata ini yang hilang?

Berapa lama anda akan menghabiskan waktu di kawasan wisata ini?

Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kenyamanan anda di kawasan wisata ini?

Maukah anda memberi kami beberapa rincian tentang diri Anda?

Kebangsaan _____ Umur: _____ lama tinggal; _____

Terima kasih atas komentar anda yang berharga

Pertanyaan Tambahan (Diucapkan secara langsung)

Jika Anda kembali, apa yang akan Anda lakukan lagi? _____

Apa yang tidak akan anda lakukan lagi _____

(Pertanyaan-pertanyaan ini membantu menyusun kebijakan)

Mohon sampaikan pendapat Anda pada setiap pertanyaan berikut :

Masyarakat lokal.....	1 (sangat tidak setuju)	2 (tidak setuju)	3 (netral)	4 (setuju)	5 (sangat setuju)
A. dampak pariwisata baik bagi kami					
B. Saya secara pribadi diuntungkan dengan adanya kegiatan pariwisata					
C. Kegiatan pariwisata di wilayah kami berdampak sebagai berikut:					
• Menciptakan lapangan kerja					
• Memperkerjakan pemuda setempat					
• Meningkatkan harga barang					
• Membantu masyarakat mendapat pelayanan sosial					
• penyebab kenaikan tingkat kejahatan					
• membahayakan standar moral setempat					
• mengganggu aktivitas masyarakat local					
• membahayakan lingkungan/alam					
• menutup akses masyarakat menuju lokasi wisata					
• Membantu merangsang pertumbuhan budaya dan kerajinan local					
• Menggunakan sumberdaya local (contohnya hasil pertanian)					
• masyarakat memiliki kontrol terhadap kegiatan pariwisata					
• Uang yang dihabiskan oleh wisatawan sampai ke masyarakat local					
• masyarakat local memiliki akses mudah ke daerah yang digunakan wisatawan					